Halili
Dwi Sunu Prioko

BUKU SEKOLAH bse ELEKTRONIK

Wahana Belajar
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI



6

TUT WURI HANDAYANI
PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

• Halili • Dwi Sunu Prioko Wahana Belajar PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 6 Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI

Halili
Dwi Sunu Prioko

Wahana Belajar
Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Wahana Belajar
Pendidikan Kewarganegaraan
Untuk SD/MI Kelas VI

Penulis	:	Halili Dwi Sunu Prioko
Editor	:	Ai Nurhayanie
Setting/Lay-out	:	Tim Setting HaKa MJ
Ilustrator	:	Edi S.
Desain Cover	:	Fascho

372.8
HAL HALILI
p Wahana Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 6 : untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidiyah Kelas VI / penyusun,Halili, Dwi Sunu Prioko ; editor, Ai Nurhayanie ; illustrator, Edi S. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009. .
ix, 136 hlm, : ilus. ; 25 cm

Bibliografi : hlm.131-132
Indeks
ISBN 978-979-068-625-0 (no.jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-644-1

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
2. Pendidikan Moral Pancasila-Pendidikan Dasar
I. Judul II. Dwi Sunu Prioko III. Ai Nurhayanie IV. Edi S

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009

Diperbanyak oleh .....

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website)* Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pemurah. Hanya atas kemurahan rahmat dan karunia-Nya buku Kewarganegaraan untuk SD kelas VI ini dapat disusun dan diterbitkan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulisan dan penerbitan buku ini. Berkat bantuan mereka, buku ini dapat digunakan oleh peserta didik kelas VI dan guru.

Buku ini disusun dalam rangka menyukseskan kegiatan pembelajaran dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Aktualitas dan relevansi isi, pola penyajian, dan sistematika buku ini diharapkan dapat membantu para peserta didik dan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang diharapkan.

Kami sadar akan adanya kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari seluruh pihak untuk perbaikan buku ini pada terbitan yang akan datang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Surakarta, Januari 2008

Penulis

Pendahuluan

Cita-cita negara kita mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya dengan memiliki nilai-nilai yang luhur sebagai bangsa yang beradab. Dalam mencapai cita-cita ini maka pemerintah memasukan pendidikan kewarganegaraan dari berbagai jenjang baik tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi sebagai mata pelajaran wajib. Dalam pelajaran kewarganegaraan pengetahuan mengenai pendidikan moral, nasionalisme, patriotisme, maupun tentang ketatanegaraan diajarkan secara sistematis. Dengan demikian pembentukan kewarganegaraan setiap warga negara dapat memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 .

Buku ini ditulis secara sistematika yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Buku ini dapat membantu siswa dalam mendalam pengetahuan tentang kenegaraan sehingga dapat membentuk kepribadian yang memiliki jiwa negara sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Sebelum kamu menggunakan buku ini, kamu sebaiknya mengenal bagian-bagian dalam buku ini. Masing-masing bagian merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dari segi materi sampai evaluasi tersusun secara berurutan sehingga Kamu harus mempelajari secara satu persatu. Dengan memtode pembelajaran ini maka diharapkan Kamu akan benar memahami pengetahuan kewarganegaraan secara baik dan menjadikan diri Kamu memiliki kepribadian yang baik pula.

Mari kita belajar Pendidikan Kewarganegaraan secara bersama-sama. Kita mendalami pengetahuan-pengetahuan moral yang baik, sikap yang mementingkan negara, susunan negara, dan lain sebagainya. Dengan belajar secara benar maka Kita akan menjadi tokoh bangsa yang memiliki jiwa kenegaraan yang baik dan juga bisa menjadi pemimpin bangsa yang baik.

"Selamat Belajar"

Petunjuk Penggunaan Buku

Tujuan Pembelajaran:
Kamu akan mempelajari pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bab ini berisi tentang pengertian NKRI, alasan mengapa perlu menjaga keutuhan NKRI, dan bagaimana upaya menjaga NKRI.

Peta Konsep:

Perumusan Pancasila
→ Nilai-nilai perjuangan | Nilai-nilai kebersamaan
→ Meneladani nilai-nilai juang para tokoh perumus Pancasila

Kata Kunci:
Negara Kesatuan Republik Indonesia, keutuhan

Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita memiliki berbagai bentuk keragaman. Seperti bahasa, suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Di satu sisi, keragaman tersebut merupakan anugerah. Di sisi lain, keragaman tersebut dapat menimbulkan perpecahan.



A. Apa Itu Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dari pengertian ini dapat kamu temukan bahwa ...

Ayo Menyanyi

Indonesia Raya
Cipt. W.R. Supratman
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku...

Sebaiknya Kamu Tahu

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta lebih dari 17.508 pulau dan luas laut sekitar 3,1 juta km^2

Jago Berpikir

Propinsi di Indonesia sekarang menjadi 33. Apa saja 7 propinsi terbaru di Indonesia beserta ibukotanya.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan awal yang akan kamu raih setelah mempelajari materi bab tersebut

Peta Konsep

Berisi garis besar isi bab

Kata Kunci

Merupakan kata-kata yang menjadi kunci konsep bab tersebut

Renungan

Merupakan persepsi atau pengantar memasuki materi dalam bab tersebut. Renungan membuatmu mengenal secara dekat mengenai materi yang akan dipelajari

Ilustrasi

Merupakan gambar yang akan mempermudah kamu memahami materi

Ayo Bernyanyi

Berisi lagu-lagu yang dapat kamu nyanyikan yang berhubungan dengan materi yang kamu pelajari

Sekilas Info

Berisi informasi terbaru berkaitan dengan materi

Jago Berpikir

Berisi masalah-masalah yang akan melatihmu untuk memecahkannya



Jago Berlatih

1. Sebutkan negara yang berbatasan darat dengan Indonesia!
2. Dimanakah kedaulatan pemerintahan negara Indonesia terletak? Di pemerintah pusat atau pemerintah daerah?



Jago Bermain

Uji Jeli

Kata yang menyebutkan propinsi atau kota di Indonesia.

Sebaiknya Kamu Biasakan



1. Hidup damai dengan teman dan tetanggamu.
2. Menghindari penggunaan kekerasan dalam bergaul.

Rangkuman



1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, melintang di khatulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.



Uji Kompetensi

Ayo mengukur kemampuanmu dalam memahami materi yang telah kamu pelajari. Kemampuanmu dapat kamu ukur dengan mengerjaan soal-soal berikut. Selanjutnya, ...

A. Memilih a, b, c, atau d sebagai jawaban yang tepat

Aktivitasmu



Tulislah laporan singkat tentang beberapa hal berikut ini:

1. Sebutkan 2 orang pahlawan perjuangan kemerdekaan RI!
2. Apa profesi mereka?



Latihan Ulangan Umum Semester 1

A. Pilihlah a, b, atau c sebagai jawaban yang tepat!

1. Negara-negara berikut berbatasan laut dengan Indonesia, *kecuali* ... .
   a. Australia   c. India
   b. Vietnam   d. Tiongkok

Daftar Pustaka

Balai Pustaka. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
BSNP. 2006. *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD*. Jakarta: Diknas

Glosarium

Agresi : Serangan
Antisipasi : Mencegah

Indeks

A
Agresi Militer Belanda 12, 17
Ancaman 10, 11, 24, 37

Jago Berlatih

Berisi aktivitas agar kamu menguasai materi yang sedang kamu pelajari.

Ayo Bermain

Berisi permainan menarik dan bermanfaat.

Sebaiknya Kamu Biasakan

Berisi kesimpulan sikap yang dapat kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Rangkuman

Berisi kesimpulan menyeluruh mengenai pengetahuan dari bab bersangkutan.

Uji Kompetensi

Berisi soal-soal yang dapat kamu kerjakan untuk mengukur kemampuanmu dalam menguasai materi.

Aktivitasmu

Berisi aktivitas yang dapat kamu lakukan untuk menguji kemampuanmu.

Latihan Ulangan Umum Semester

Berisi soal-soal yang dapat kamu kerjakan untuk mengukur kemampuanmu menguasai materi satu semester

Daftar Pustaka

Berisi daftar buku-buku acuan yang digunakan

Glosarium

Merupakan kata-kata sulit beserta artinya.

Indeks

Merupakan kata-kata penting serta halaman kemunculannya.

Daftar Isi



NILAI-NILAI JUANG DALAM PERUMUSAN PANCASILA

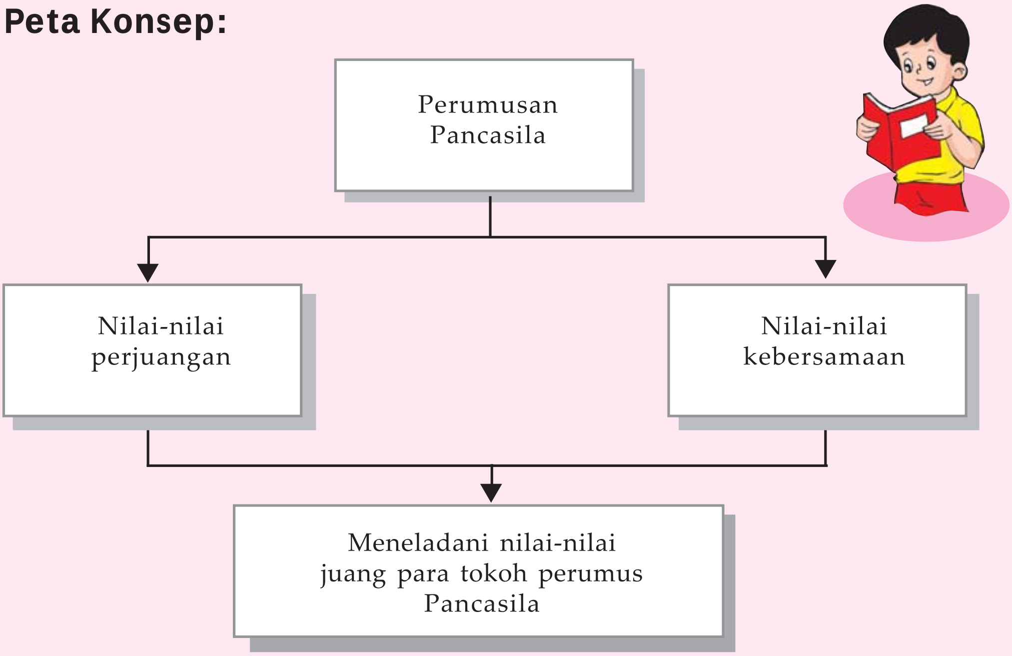




Tujuan Pembelajaran:

Kamu akan mempelajari nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bab ini berisi tentang nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila, nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila, dan meneladani nilai-nilai juang para tokoh perumus Pancasila.

Peta Konsep:





Kata Kunci:

nilai-nilai juang, nilai-nilai kebersamaan, perumusan Pancasila



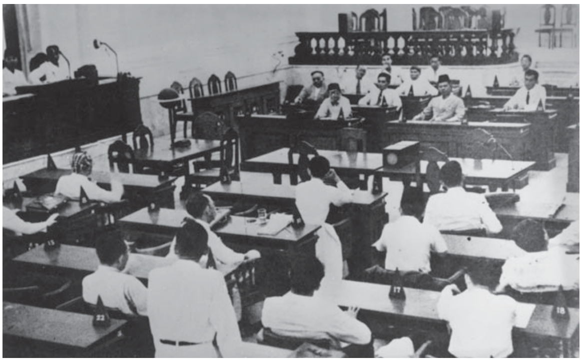
Renungan

Bacalah teks berikut dengan baik dan renungkan maknanya!

Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para Perumus Pancasila merupakan pendiri negara Republik Indonesia. Mereka memiliki jiwa perjuangan dan kebersamaan yang mengagumkan. Apakah kamu mampu meneladani nilai-nilai juang para tokoh perumus Pancasila?


www.e-dukasi.net

Gambar 1.1 Sidang BPUPKI



A. Nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

1. Proses Perumusan Pancasila

Ingatkah kamu dengan organisasi yang didirikan beberapa bulan menjelang kemerdekaan Indonesia? Organisasi itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Badan tersebut dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945 dan beranggotakan 62 orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.

Peserta sidang BPUPKI diliputi dengan segala kesungguhan dan didorong oleh semangat untuk merdeka.Mereka mampu menghasilkan usulan-usulan berupa gagasan tentang dasar negara. Gagasan tentang dasar negara tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Ir Soekarno dan Dr. Soepomo. Sidangnya yang pertama, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI membahas asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Hasil dari sidang ini lahirlah beberapa usul tentang dasar negara.

Gagasan Mr. Mohammad Yamin yang diusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 adalah sebagai berikut:

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Mufakat dan demokrasi
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial.

Gagasan Ir. Soekarno yang diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Dalam sidangnya yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 BPUPKI menghasilkan rancangan hukum dasar. Rancangan tersebut terdiri dari pembukaan (*preambule*) dan batang tubuh (pasal-pasal). Rancangan Pembukaan yang disiapkan oleh BPUPKI ini disebut juga Piagam Jakarta. Pada awalnya, Rancangan Pembukaan UUD ini disusun oleh Panitia kecil dari BPUPKI yang berjumlah sembilan orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Di dalam Piagam Jakarta ini terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang berbeda dengan rumusan Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan Pancasila yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan tersebut mengalami perubahan-perubahan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan inilah yang kemudian disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PPKI itu didasarkan pada laporan dari utusan *Kaigun* (Angkatan Laut Jepang) kepada Drs. Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari. Utusan tersebut melaporkan bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan. Keberatan tersebut diungkapkan terhadap sila pertama Pancasila pada rumusan Piagam Jakarta (Rancangan Pembukaan UUD) yang berbunyi: “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”. Maka, dengan semangat persatuan, keesokan harinya yaitu tanggal 18 Agustus 1945 hal yang pelik ini dapat diselesaikan dengan baik.



upload.wikimedia.org

Gambar 1.2 Sidang PPKI

Sebelum rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu dimulai, masalah keberatan dari daerah Indonesia bagian timur tersebut dibicarakan terlebih dahulu oleh Drs. Moh. Hatta dengan empat orang anggota PPKI, yaitu K.H. Wakhid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Moh. Hasan. Empat orang tersebut adalah tokoh yang beragama Islam. Dari pembicaraan tersebut disepakati untuk mengubah rumusan yang terdapat di dalam rancangan pembukaan yang semula berbunyi, "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini jelas menimbulkan kelegaan bagi semua pihak, berkat kearifan para tokoh-tokoh pendiri negara *(the founding fathers)* Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan persatuan. Dengan adanya perubahan ini, maka rumusan Pancasila yang sah berlaku sekarang adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Undang-Undang Dasar RI yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan terdiri dari empat alinea sedangkan batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal ditambah empat pasal aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan.

Pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang pertama itu memuat materi tentang:

a. Pengaturan sistem pemerintahan negara, di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan tata hubungan dari lembaga-lembaga negara dan pemerintah.
b. Tata hubungan antara negara dan warga negara dan penduduknya secara timbal balik.
c. Hal-hal lain seperti bendera, bahasa dan perubahan Undang-Undang Dasar.

Sebaiknya Kamu Tahu



Undang-Undang Dasar R.I yang pertama kali disahkan itu masih bersifat singkat dan supel. Dikatakan singkat, karena hanya memuat 37 pasal ditambah empat pasal aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan. Dikatakan supel, karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja atau hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Sejak reformasi 1998 sampai sekarang telah berkembang pemikiran bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat itu tidak memadai lagi untuk mengikuti perkembangan jaman. Oleh karenanya sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 telah diadakan perubahan-perubahan (amandemen) sebanyak empat kali.

Selanjutnya, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kedua, tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengambil dua buah keputusan lagi, yaitu:

a. Penetapan 12 (dua belas) kementerian dalam lingkungan pemerintah, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
b. Pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 (delapan) propinsi, yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan membentuk:

a. Komite Nasional
b. Partai Nasional Indonesia
c. Badan Penolong Korban Perang;
d. Badan Keamanan Rakyat

Komite Nasional yang dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Hal tersebut dimaksudkan sebagai "penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat". Komite Nasional Indonesia Pusat yang berada di Jakarta diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945.

2. Latar Belakang Proklamasi

Coba kamu nyanyikan lagu ini dan perhatikanlah dengan baik syairnya.

Ayo Menyanyi



Indonesia Raya

(WR Supratman)

Indonesia Tanah Airku,
Tanah tumpah darahku
Disanalah aku berdiri,
jadi Pandu Ibuku.
Indonesia, kebangsaanku,
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu
Hiduplah tanahku,
Hiduplah Negeriku,
Bangsaku Rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka
Tanahku Negeriku yang kucinta
Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya.

Telah berabad-abad lamanya bangsa Indonesia mengalami penderitaan berupa penjajahan oleh bangsa asing. Penjajahan sebenarnya menginjak-injak hak asasi manusia, karena manusia kehilangan kebebasan atau kemerdekaannya. Bangsa Indonesia diperlakukan dengan semena-mena sesuai dengan keinginan penjajah.

Mereka membuat peraturan sendiri yang bersifat diskriminatif dan menambah kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu, selama penjajahan baik oleh Belanda maupun Jepang, rakyat banyak mengalami kemunduran, keterbelakangan dan kebodohan.

Kesadaran inilah yang membawa bangsa Indonesia masa-masa pergerakan nasional. Baik generasi muda maupun tua berusaha bahu membahu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa ia harus bergerak sendiri untuk mewujudkan kemerdekaannya yang telah dirampas oleh penjajah. Proklamasi adalah momentum puncak perjuangan meraih kemerdekaan tersebut.

3. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan R.I

Ayo Menyanyi



Sabang Sampai Merauke

(R. Suraryo)

Dari Sabang sampai Merauke,
berjajar pulau-pulau.
Sambung menyambung menjadi satu,
itulah Indonesia.
Indonesia Tanah Airku,
aku berjanji padamu.
Menjunjung tanah airku.
Tanah airku Indonesia.

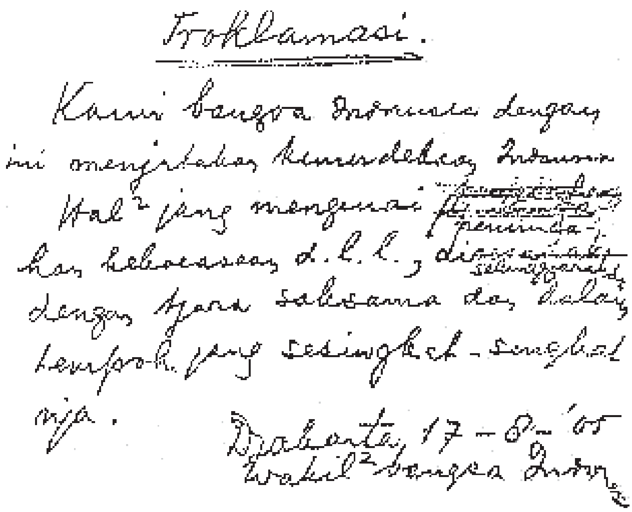
Jepang dijatuhi bom oleh Sekutu, tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Radjiman Widyodiningrat dipanggil oleh Jenderal Besar Terauchi yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Ketiga tokoh pergerakan nasional tersebut berangkat menuju markas besar Terauchi di Dalath, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut Jenderal Terauchi menyampaikan kepada ketiga pemimpin Indonesia itu bahwa Pemerintah Kekaisaran Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai.*

Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh wilayah, tetapi bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat.

Menurut Ir. Soekarno pada tanggal 9 Agustus 1945 itu Jenderal Terauchi memberikan tiga hal, yaitu:

a. Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua, sedangkan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai anggota.
b. Panitia boleh mulai bekerja sejak tanggal 9 Agustus 1945.
c. Cepat atau tidaknya pekerjaan (kemerdekaan) diserahkan seluruhnya kepada panitia.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan kawan-kawan kembali ke tanah air. Di lapangan terbang Kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum “jagung berbunga” dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Ir. Soekarno atas tanggung jawabnya sendiri menambah jumlah anggota baru PPKI sebanyak 18 orang sehingga jumlah keseluruhan ada 21 orang. Hal ini dimaksudkan agar sifat panitia persiapan kemerdekaan itu berubah menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Selain dari Jawa, tujuh orang anggota khusus didatangkan dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Bali agar representatif mewakili rakyat Indonesai yang tersebar di nusantara. Setelah itu, anggota PPKI masih ditambah lagi sebanyak enam orang sebagai wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat sehingga jumlah keseluruhan anggota dan ketua ada 27 orang.


Proklamasi.
Kami bangsa Indonesia dengan
ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal² jang mengenai pemindahan
kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara saksama dan dalam
tempoh jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, 17-8-'05
Wakil² bangsa Indonesia.

www.wordpeess.com

Gambar 1.3 Teks Proklamasi yang ditulis Ir. Soekarno

Sebaiknya Kamu Tahu



Sebelum tanggal 14 Agustus 1945 Kantor Berita Indonesia masih menerima berita-berita dari Tokyo. Namun, tiba-tiba setelah tanggal 14 Agustus 1945 tidak menerima berita lagi. Akhirnya diketahui bahwa sejak tanggal 13 Agustus 1945 sampai dengan 14 Agustus 1945 Jepang telah siap menghentikan peperangannya dan menyerah kalah kepada Sekutu. Secara resmi berita itu diumumkan pada tanggal 14 Agustus 1945 pukul 12.00. Dengan diam-diam para pembesar tinggi, baik militer maupun sipil Jepang dapat mengetahui dan mendengarkan pidato Kaisar Hirohito tentang sebab-sebab penyerahan tersebut.

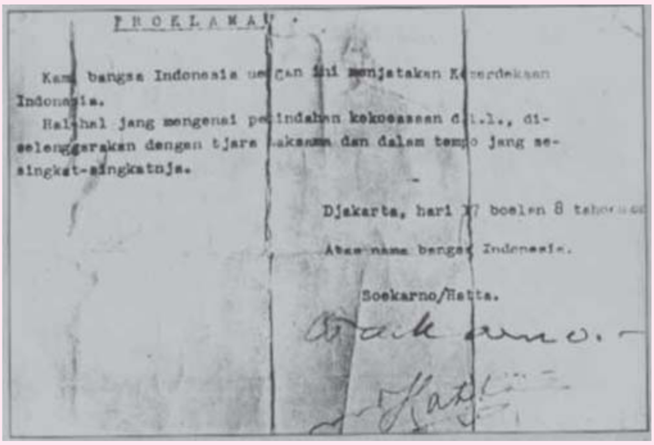
Para pemuda Indonesia di antaranya adalah Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Sjahrir, Soedarsono, Soepono, dan kawan-kawan menghendaki kemerdekaan Indonesia dilakukan secepatnya. Sutan Sjahrir sebagai tokoh pertama yang menginginkan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang. Hal itu dikarenakan telah mendengar siaran radio luar negeri tentang kekalahan Jepang melawan Sekutu. Golongan pemuda ini meminta kepada golongan tua yang menjadi pemimpin pergerakan pada waktu itu seperti Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, dengan pertimbangan yang sangat hati-hati golongan tua belum mau memenuhi permintaan golongan muda itu. Golongan tua berpendapat bahwa bangsa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah dengan jalan bekerja sama dengan Jepang. Golongan muda menghendaki sebaliknya, Indonesia merdeka tanpa campur tangan Jepang.

Perbedaan pendapat itu memuncak sehingga akhirnya para pemuda berinisiatif untuk mengungsikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengas dengklok. Dengan tujuan, agar dapat berunding dengan tenang mengenai kemerdekaan Indonesia tanpa pengaruh Jepang. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB. Akhirnya, setelah diadakan pembicaraan antara golongan tua dan golongan muda, Ir. Soekarno menyetujui desakan golongan muda yang diwakili oleh Singgih bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diucapkan tanpa pengaruh Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah kesepakatan itu, mereka semua kembali ke Jakarta dan selanjutnya merapatkan penyusunan naskah Proklamasi. Rapat tersebut dilaksanakan di tempat kediaman Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan oleh tiga orang pimpinan golongan tua, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo dengan disaksikan oleh golongan muda antara lain Sukarni, BM. Diah dan beberapa orang Jepang.

Yang menuliskan draftnya dalah Ir. Soekarno, sedangkan Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. Hasilnya berupa rumusan tulisan tangan Ir. Soekarno.

Rombongan penulis naskah kemudian menemui hadirin yang menunggu di ruang depan. Ir. Soekarno membacakan draft rumusan yang telah mereka hasilkan itu dan menyarankan agar segenap yang hadir menandatangani bersama-sama naskah Proklamasi tersebut selaku "Wakil-wakil Bangsa Indonesia". Saran ini langsung mendapat penolakan dari golongan muda. Kemudian atas saran Sukarni selaku pimpinan pemuda mengusulkan agar yang menandatangani naskah Proklamasi itu hanyalah Soekrano – Hatta atas nama bangsa Indonesia, karena mereka berdua dikenal sebagai pemimpin utama bangsa Indoensia. Usul itu diterima baik oleh hadirin dan selanjutnya Ir. Soekarno meminta kepada Sayuti Melik agar mengetik naskah bersih Proklamasi berdasarkan draft dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui.


PROKLAMASI.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

ketik_anick.wordpress

Gambar 1.4 Naskah Proklamasi yang telah diketik

4. Pidato Proklamasi

Tanggal 17 Agustus 1945 yang jatuh pada hari Jumat Legi, pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Ir Soekarno memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia yang terlebih dahulu diadakan pidato pendek. Inilah isi pidato tersebut:

"Saudara-saudara sekalian!

Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun! Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita.

Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri pada mereka. Tetapi pada hakekatnya kita tetap percaya akan kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di dalam tangan kita sendiri, Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.

Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan itu.



Gambar 1.5 Pidato Proklamasi

Saudara-saudara! Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami!

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta.

Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara merdeka, Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi.

Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu."

Sesaat setelah Proklamasi , diadakan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di halaman gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Petugas yang diserahi tugas mengibarkan bendera merah putih adalah Latief Hendraningrat, S.K. Trimurti dan Suhud. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno.

Berita tentang Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 segera menyebar dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh rakyat. Bahkan para pejuang seperti Sukarman, Suhendar, Sutomo dan Susilaharja segera membuat radio pemancar sehingga berita tersebut cepat tersebar hingga ke pelosok tanah air.



jeasz055.blogspot.

Gambar 1.6 Pengibaran Sang Saka Merah Putih

Bermain Peran

Soekarno adalah seorang orator ulung. Praktikkan seolah-olah kamu sedang berperan sebagai Bung Karno. Naskah yang bisa kamu gunakan sebagai materi pidato adalah apa yang disampaikan Bung karno menjelang Proklamasi Kemerdekaan.



Jago Berlatih

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Siapakah Ketua BPUPKI?
2. Sebutkan rumusan Pancasila yang dihasilkan oleh Panitia Kecil PPKI (Piagam Jakarta)?
3. Mengapa kalimat "..dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya" dihapus?
4. Siapa saja tiga kelompok tua yang menyusun naskah Proklamasi?
5. Siapakah yang menulis tangan naskah Proklamasi?

Isilah pertanyaan berikut ini dengan pilihan isian yang sesuai sebagaimana yang tersedia pada kolom paling kanan!

No	Pernyataan	Isian
1	.... yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, dijahit oleh Ibu Fatmawati	dua puluh tujuh
2	Naskah proklamasi dalam bentuk ketikan diketik oleh	bendera merah putih
3	*Dokuritsu Zyunbi Inkai* dalam bahasa Indonesia berarti	PPKI
4	Anggota lengkap terakhir PPKI sebanyak ... orang	jagung berbunga
5	Soekarno pernah mengatakan, Indonesia akan merdek merdeka sebelum	Sayuti Melik



B. Nilai-Nilai Kebersamaan dalam Perumusan Pancasila

PPKI mengadakan sidang pertama anggal 18 Agustus 1945. Sebelum sidang dimulai Drs. Moh. Hatta berkonsultasi dengan empat tokoh pemuka Islam yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, KH. Wakhid Hasyim, Teuku Moh Hasan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk membahas masalah rancangan pembukaan UUD yang terdapat dalam Piagam Jakarta.

Pembahasan itu mengenai sila pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya-pemeluknya". Hal itu karena tokoh-tokoh Indonesia Timur merasa keberatan, bahkan mengancam akan mendirikan negara Indonesia Timur. Menurut mereka, dengan rumusan seperti itu seolah-olah Pancasila hanya mengatur satu golongan saja dari bangsa Indonesia. Golongan yang lain tidak mendapat tempat padahal Indonesia terdiri atas berbagai macam golongan, suku, bangsa, dan agama. Demi menjaga keutuhan serta menjaga keberagaman komponen bangsa dan negara, maka dalam waktu 15 menit dicapai kata sepakat untuk menghilangkan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Dengan demikian,bunyi sila pertama Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa'. Akhirnya rapat pleno PPKI berlangsung lancar. Pembahasan rancangan pembukaan UUD 1945 berhasil dibahas dalam tempo kurang dari 2 jam.

Dari uraian di atas, kamu dapat mengambil pelajaran bahwa para tokoh perumus Piagam Jakarta telah menunjukkan jiwa besar dan semangat nasionalisme yang tinggi. Mereka bersedia menerima keputusan bersama dalam sidang PPKI tersebut. Mereka tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama, meskipun ada yang harus mengorbankan pendapatnya. Sikap yang perlu kita teladani adalah:

1. saling menghormati dan menghargai hak orang lain;
2. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
3. lapang dada;
4. berjiwa besar;
5. rasa tanggung jawab.

1. Menghargai Pendapat Orang Lain

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Itulah mengapa pendapat setiap orang perlu dihargai. Namun, orang lain pun harus menghargai dan menghormati pendapat kamu. Pada saat menyampaikan pendapat kamu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Sopan;
b. tidak memaksakan pendapat pada orang lain;
c. tidak menyimpang dari pembicaraan atau masalah yang dihadapi;
d. tidak memotong pembicaraan orang lain;
e. isi pembicaraan mengutamakan kepentingan bersama;
f. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Menerima Keputusan Bersama

Keputusan bersama adalah sebuah kesepakatan. Bagaimanakah sikap kamu terhadap hasil keputusan bersama? Jika hasil keputusan bersama tidak sesuai dengan kepentingan kamu, kamu harus bersikap ikhlas dan berjiwa besar dalam menerima keputusan tersebut.

Kamu harus mendahulukan kepentingan bersama sebagaimana telah dilakukan oleh tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia.

3. Melaksanakan Keputusan Bersama

Setelah semua pihak menerima hasil keputusan bersama, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan hasil keputusan bersama.

Dalam kehidupan sehari-hari, hasil keputusan bersama ada pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.



Jago Berlatih

1. Temukan bentuk kebersamaan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa!
2. Apa yang akan kamu lakukan jika pendapatmu ternyata bertentangan dengan kepentingan bersama?
3. Berikan contoh melaksanakan kesepakatan bersama dalam persoalan-persoalan di kelasmu!

Nyatakanlah sikapmu dengan memberi tanda cek (√) pada kolom di samping pernyataan!

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Tahu	Tidak Setuju
1	Kamu harus mengalah meskipun pendapat kamu benar dan keputusan orang lain belum tentu benar			
2	Kesepakatan bersama dilaksanakan untuk kemanfaatan bersama dan tidak untuk kemudaratan bersama			
3	Apapun pendapat orang lain kamu harus menghargainya			
4	Pancasila bisa dirumuskan dalam suasana kebersamaan para *founding fathers*			
5	Pendapat banyak orang boleh dikalahkan kepentingan orang yang berpengaruh			



C. Meneladani Nilai-nilai Juang Para Tokoh



Ayo Menyanyi

Gugur Bunga

(Ismail Marzuki)

Betapa hatiku takkan pilu
Telah gugur Pahlawanku
Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri
Siapakah kini pelipur lara, nan setia dan perwira
Siapakah kini Pahlawan hati, pembela Bangsa sejati
Telah gugur Pahlawanku, tunai sudah janji bakti
Gugur satu tumbuh seribu, tanah Air jaya sakti
Gugur bungaku di taman bakti, di haribaan Pertiwi.
Harum semerbak menambah sari
Tanah air jaya sakti

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah orang-orang yang amat berjasa. Mereka telah bekerja keras melalui gagasan dan pemikirannya untuk mempersiapkan tatanan pemerintahan Republik Indonesia. Sebagaimana diuraikan di atas para pendiri negara itu terdiri dari banyak tokoh. Mereka adalah yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI) dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Adapun nama para tokoh tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nama-Nama Tokoh Pendiri Negara

a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Ketua : Soekarno
Wakil Ketua : Mohammad Hatta
Anggota : Soepomo, Radjiman Widyodiningrat, RP Suroso, Sutardjo, Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Kadir, Soerjohamidjojo, Poeroebojo, Yap Tjawn Bing, J Latuharhary, Amir, Abdul Abas, Mohamad Hasan, Hamidhan, GSJJ Ratulangi, Andipangeran, I Gusti Ktut Pudja.
Anggota Tambahan: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman, Sajuti, Koesoema Soemantri, Subardjo.

(Sumber: Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, Setneg, Edisi III, 1995).

b. Susunan Pengurus BPUPKI

Ketua : dr. Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua : Ichibangase Yosio dan RP. Suroso

Anggota Berjumlah 60 Orang Sebagai Berikut:

Abikoesno Tjokrosoejoso, Haji A. Sanusi, Kh Abdul Halim, Prof. Dr. Asikin Widjajakoesoemo, M.Aris, Abdul Kadir, Dr. R. Boentaran Martoatmodjo, BPH Bintarto, Ki Hadjar Dewantara, AM. Dasaad, Prof, Dr. PAH Djajadingrat, Drs. Moh. Hatta, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. R. Hindromartono, Mr.Muh Yamin, RAA Soemitro Kolopaking Probonegoro, Mr. Dr. R Koesoemah Atmadja, Mr. J Latuharhary, R. Margono Djojohadikoesoemo, Mr. AA Maramis, KH Masjkoer, KHM Mansoer, Moenandar, AK Moezakir, R. Otto Iskandar Dinata, Parada Harahap, BPH Poeroebojo, R. Abdoelrahim Pratalykrama, R. Roeslan Wongsokoesoemo, Prof. Ir. R Rooseno, H. Agoes Salim, Dr. Sambsi, Mr. RM Sartono, Mr. R Samsoedin, Mr. R Sastromoeljono, Mr. R. Singgih, Ir. R Soekarno. R. Soediman, R. Soekardjo Wiryopranoto, Dr. Soekiman, Mr. A. Subardjo, Prof. Mr. Dr. soepomo, Ir. RMP Soerahman, Sutardjo Tjokroadisoerjo Kartohadikoesoemo, R MTA Soeryo, Mr. Soesanto, Mr. Soewandi,Drs. KRMA Sosrodiningrat, KHA Wachid Hasjim, KRM TH Woerjaningrat, RAA Wiranatakoesoema, Mr. KRMT Wongsonagoro, Ny. Mr Maria Ulfa Santoso, Ny. RSS Mangoenpoespito, Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Liem Koen Hian, Mr. Tan Eng Hoa, PF Dahler, dan A. Baswedan.

Anggota Tambahan Sebanyak 6 Orang:

KH. Abdul Fatah Hasan, R. Asikin Natanegara, BKPA Soerjo Hamidjoyo, Ir. M Pangeran M. Noer, Mr. M Besar, Abdul Kaffar.

(Sumber: Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, Setneg, Edisi III, 1995).

2. Riwayat Hidup Singkat Beberapa Pendiri Negara

Sekian banyak tokoh yang sangat berjasa atas berdirinya Indonesia tersebut, berikut ini akan diuraikan riwayat hidup singkat beberapa tokoh terkemuka agar kamu dapat meneladaninya.

a. Prof. Mohammad Yamin, S.H.



Gambar 1.7 Prof. Mohammad Yamin, SH.

Dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1903 di Sumatera Barat. Beliau menamatkan pendidikan guru dan pernah mengabdikan diri untuk mengajar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya dengan beasiswa dari pemerintah Belanda melanjutkan ke sekolah kehakiman di Jakarta. Beliau bercita-cita tinggi dalam upaya mempersatukan bangsanya. Ia dengan gencar mengkritik pemerintah penjajah. Sebagai akibatnya, beasiswa yang diterimanya dicabut. Namun, ia berhasil menamatkan pendidikannya di sekolah kehakiman.

Kegiatan berorganisasi dan berpolitik dimulainya dengan memasuki Jong Sumatra Bond dan Indonesia Muda. Cita-cita persatuan bangsa yang didambakan akhirnya terwujud dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Dalam rangka persiapan terbentuknya Republik Indonesia merdeka, Mohammad Yamin berperan aktif dengan mengajukan usulan berupa gagasan tentang rumusan dasar negara. Setelah terbentuknya Republik Indonesia, Mohammad Yamin diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia. Beliau terkenal pula sebagai seorang penyair dan banyak menulis buku mengenai hukum dan sejarah.

b. Ir. Soekarno



Gambar 1.8 Ir. Soekarno

Ir. Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau populer dengan panggilan Bung Karno. Ir Soekarno bersama Drs. Mohammad Hatta telah mengambil keputusan paling bersejarah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Beliau dikenal sebagai orator mimbar (jago pidato).

Menguasai banyak bahasa asing serta pemikir yang handal. Ir Soekarno adalah salah satu tokoh perumus Pancasila. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 18 Agustus 1945 beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 081/TK/Tahun 1986 tanggal 23 Oktober 1986, almarhum Ir. Soekarno dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Namanya sekarang diabadikan sebagai nama Bandara Soekarno-Hatta, di Cengkareng, Jakarta.

c. Drs. Mohammad Hatta

Panggilan populernya adalah Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta lebih dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia adalah seorang pemimpin yang berdisiplin tinggi, tegas dan taat beragama. Meskipun dikenal dari keluarga berada, Bung Hatta dikenal sederhana. Perbuatan dan perkataan Bung Hatta juga selalu sejalan.

Pada tahun 1926, Bung Hatta menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah suatu gerakan mahasiswa yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno bersama Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 agustus 1945 Bung Hatta diangkat sebagai wakil presiden Republik Indonesia.



www.wikipedia.com

Gambar 1.9 Drs. Mohammad Hatta

Beliau dikenal memiliki sifat toleransi yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan pada peristiwa menjelang pengesahan dasar negara. Pada saat itu, sebagian kecil peserta sidang mengajukan usul keberatan terhadap rumusan dasar negara pada sila pertama. Bung Hatta yang dikenal sebagai muslim yang amat taat itu segera berkonsultasi dengan empat orang tokoh Islam lainnya. Pertemuan Bung Hatta dengan empat tokoh Islam akhirnya menyepakati usulan tokoh nonmuslim untuk mengganti kalimat sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Penggantian ini dilakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan golongan.

Tahun 1949 Bung Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag yang menghasilkan pengakuan kedaulatan terhadap kedaulatan RI oleh pihak Belanda. Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 1956. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta.

d. Prof Dr R. Soepomo, SH.



Gambar 1.10 Prof. Dr. R. Soepomo, SH.

Soepomo lahir 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Surakarta. Semasa bersekolah, beliau memasuki organisasi Jong Java. Soepomo adalah pakar hukum tata negara. Berkat keahliannya itu, beliau menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI.

Beliau sangat berjasa, karena buah pikirannya banyak digunakan dalam penyusunan UUD 1945. Pada masa kemerdekaan, Soepomo diangkat sebagai menteri kehakiman. Meninggal pada tanggal 12 September 1958. Jenasahnya dimakamkan di Solo.

e. K.H. Wakhid Hasyim



Gambar 1.11 K.H. Wakhid Hasyim

Wakhid Hasyim dilahirkan pada tahun 1914 di Jombang, Jawa Timur. Ia dibesarkan dalam lingkungan pesantren. Ayahnya seorang Kyai di pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur.

Pada tahun 1942, Wakhid Hasyim terpilih menjadi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama (NU). Beliau kemudian diangkat sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Peranan Wakhid Hasyim dalam perumusan dasar negara sangat penting. Bersama empat orang tokoh agama Islam berhasil menyepakati untuk mengubah rumusan sila pertama dari Pancasila. Perubahan itu semata-mata demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

3. Meneladani Nilai-nilai Juang Para Tokoh Pendiri Negara

Dalam proses pendirian negara, para tokoh pendiri negara melakukan banyak perjuangan yang pantas untuk ditiru. Tindakan-tindakan perjuangan itu dapat dirumuskan sebagai nilai-nilai juang. Berikut ini kamu akan mempelajari nilai-nilai juang para tokoh pendiri negara. Nilai-nilai tersebut dapat kamu pahami dan kamu teladani dalam kehidupan sehari-hari.

Ayo Menyanyi



Padamu Negeri

(Kusbini)

Padamu Negeri, kami berjanji
Padamu Negeri, kami berbakti
Padamu Negeri, kami mengabdi
Bagimu Negeri, jiwa raga kami.

a. Berjiwa Besar

Jika kamu mencermati proses perumusan Pancasila, sikap berjiwa besar tercermin dengan jelas pada waktu pengambilan keputusan. Para tokoh menerima dan melaksanakan keputusan dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam musyawarah untuk mufakat tidak ada yang merasa menang dan dikalahkan.

Sebagai generasi penerus kamu patut meneladani sikap berjiwa besar. Contoh sikap ini dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut:

1) menerima keputusan musyawarah dengan ikhlas;
2) mau mengakui keunggulan orang lain;
3) mau mengakui kesalahan dan mau minta maaf;
4) membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan.

b. **Cinta Tanah Air**

Ayo Menyanyi



Kulihat Ibu Pertiwi

(Charles C)

Kulihat Ibu Pertiwi,
sedang bersusah hati
Air matamu berlinang,
mas intanmu terkenang
Hutan sawah gunung lautan, simpanan kekayaan
Kini Ibu sedang susah,
merintih dan berdoa



Gambar 1.12 Peta Wilayah Indonesia

Para tokoh bangsa mencurahkan tenaga dan pikiran untuk meletakkan dasar Indonesia merdeka. Mereka duduk bersama tanpa membedakan latar belakangnya, dalam pemikiran mereka hanya ada satu yaitu kejayaan bangsa. Sikap cinta tanah air dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. misalnya:

a. melestarikan lingkungan hidup di sekitarmu;
b. belajar dan bekerja keras untuk masa depanmu;
c. melakukan kegiatan yang mengharumkan nama bangsa dan negara;
d. berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
e. mencintai produksi dalam negeri.

c. Jiwa Persatuan

Ayo Menyanyi



Satu Nusa Satu Bangsa

(L Manik)

Satu Nusa
Satu Bangsa
Satu Bahasa kita
Tanah air Pasti jaya, untuk slama-lamanya
Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta
Nusa Bangsa dan Bahasa, kita bela bersama.



www.bloganakmuda.blogspot.com

Gambar 1.13 Berbagai rumah adat Taman Mini Indonesia Indah

Para perumus Pancasila memiliki latar belakang suku, agama, adat dan budaya yang berbeda-beda. Namun, di antara peserta rapat tidak menonjolkan golongan masing-masing. Para pendiri negara itu menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Jiwa persatuan dan kesatuan itulah yang akhirnya menghasilkan Indonesia merdeka. Jiwa persatuan juga dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya:

a. suka bergotong royong;
b. gemar tolong menolong;
c. hidup rukun;
d. menghargai perbedaan.

d. Menghargai Pendapat Orang Lain



Gambar 1.14 Sekelompok Orang Sedang Bermusyawarah

Bangsa Indonesia mempunyai cara khas untuk menyelesaikan masalah bersama, yaitu dengan musyawarah. Pendapat setiap orang harus dihargai. Begitu juga orang lain juga harus menghargai pendapat kita. Masing-masing orang mengemukakan pendapatnya serta mendengar pendapat orang lain. Setelah itu diambil suatu keputusan. Keputusan yang paling baik adalah keputusan yang terjadi karena mufakat.

Hal tersebut bisa kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di kelasmu. Misalnya ketika ada temanmu yang sakit. Kamu bisa musyawarahkan di kelas, kapan akan menjenguk, siapa saja yang harus ikut, apa yang akan dibawa sebagai buah tangan, dan sebagainya. Setiap orang di antara kalian tidak boleh memaksakan pendapatnya, sebagaimana juga tidak boleh mencela pendapat teman yang menurutmu tidak tepat atau tidak kamu setujui.

e. Jiwa Kepahlawanan



Gambar 1.15 Taman Makam Pahlawan tempat para kesuma bangsa dikuburkan

Jiwa kepahlawanan tercermin dari sikap para pendiri negara dalam proses perumusan Pancasila.

Mereka memiliki sikap rela berkorban tanpa pamrih dalam mewujudkan Indonesia merdeka. Mereka selalu memikirkan masa depan bangsa dengan menata sistem pemerintahan Indonesia.

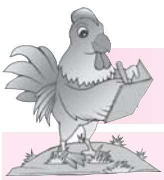
Sikap kepahlawanan para tokoh tersebut patut diteladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap kepahlawanan yaitu sebagai berikut:

1) berani membela kebenaran dan keadilan;
2) berani menegur teman yang berbuat tidak baik;
3) rela berkorban untuk kepentingan bersama;
4) menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan.

f. Mendahulukan Kepentingan Umum

Para pendiri negara yang ikut merumuskan Pancasila bekerja siang malam tanpa mengenal lelah. Mereka mempersiapkan kemerdekaan beserta alat-alat perlengkapan negara dengan sungguh-sungguh.

Sebagai hasil jerih payah mereka lahirlah UUD 1945 yang di dalam pembukaannya termuat tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara Indonesia. Semua itu mereka lakukan demi kepentingan bangsa Indonesia bukan untuk dirinya sendiri. Mereka berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap mendahulukan kepentingan umum perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari.



Jago Berlatih

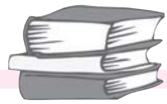
Uraikan secara singkat riwayat hidup tokoh pendiri negara berikut!

No	Nama Pejuang	Riwayat Hidup
1	Moh. Yamin	
2	Soekarno	
3	Moh. Hatta	
4	Soepomo	
5	Wakhid Hasyim	

Uraikanlah nilai-nilai juang berikut ini.

No	Nilai-nilai Juang	Penjelasan
1	Berjiwa besar	
2	Cinta tanah air	
3	Jiwa Persatuan	
4	Menghargai pendapat orang lain	
5	Mendahulukan kepentingan umum	

Rangkuman



1. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat lepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
2. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang dianggap baik dan diyakini kebenarannya.
3. Sidang BPUPKI pertama 29 Mei-1 Juni 1945 membaahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
4. Pada sidang BPUPKI pertama, terdapat tiga tokoh yang menyampaikan pidato tentang dasar negara yaitu: Moh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.
5. Sidang BPUPKI kedua tanggal 10-17 Juli 1945 membahas Rancangan Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar.
6. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Mukadimah/Pembukaan Hukum Dasar yang diberi nama Piagam Jakarta.
7. Tidak adanya persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia mengakibatkan kegagalan dalam mengusir penjajah.
8. Organisasi Budi Utomo sebagai perintis bangkitnya kesadaran perjuangan bangsa Indonesia. Tanggal berdirinya diperingati sebagai hari kebangkitan nasional.
9. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kamu teladani antara lain sikap persatuan dan kesatuan, semangat kekeluargaan, kebersamaan, cinta tanah air, mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, pengabdian, serta jiwa kepahlawanan.



Uji Kompetensi

Ayo mengukur kemampuanmu dalam memahami materi yang telah kamu pelajari. Kemampuanmu dapat kamu ukur dengan mengerjaan soal-soal berikut. Selanjutnya, mintalah saran kepada gurumu apakah kemampuanmu sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan.

A. Memilih a, b, c, atau d sebagai jawaban yang tepat

1. Ketua BPUPKI adalah… .
   a. Ir. Soekarno
   b. Drs. Moh. Hatta
   c. Dr. Rajiman Widyodiningrat
   d. Mr. Moh. Yamin

2. BPUPKI dibentuk tanggal... .
   a. 1 Maret 1945
   b. 29 Mei 1945
   c. 1 Juni 1945
   d. 22 Juni 1945

3. Piagam Jakarta dirumuskan oleh... .
   a. seluruh anggota BPUPKI
   b. seluruh anggota PPKI
   c. panitia sembilan
   d. tokoh kemerdekaan

4. Urutan sila Pancasila yang resmi sesuai dengan….
   a. Piagam Jakarta
   b. usulan Ir Soekarno
   c. usulan Moh Yamin
   d. Alinea 4 UUD 1945

5. Tanggal 1 Juni seharusnya kita peringati sebagai hari... .
   a. lahirnya Pancasila
   b. kesaktian Pancasila
   c. disyahkannya UUD 1945
   d. disyahkannya dasar negara

6. Gambar pohon beringin pada lambang negara Indonesia merupakan simbol dari sila ....
   a. Ketuhanan Yang Maha Esa
   b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
   c. Persatuan Indonesia
   d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

7. Tokoh pengusul dasar negara yang berasal dari Sumatera Barat adalah ... .
   a. Drs. Moh. Hatta
   b. Mr. Moh. Yamin
   c. K.H. Wahid Hasyim
   d. Haji Agus Salim

8. Nilai-nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasila berasal dari ....
   a. pemikiran para tokoh nasional
   b. nilai luhur budaya bangsa Indonesia
   c. adat dan budaya suku Jawa
   d. usulan perdana menteri Jepang

9. Jepang memberi janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan maksud agar ... .
   a. membantu Indonesia agar bebas dari penjajahan Belanda
   b. bangsa Indonesia bersemangat membantu Jepang dalam melawan Sekutu
   c. rakyat Indonesia tidak melawan kepada Jepang
   d. bangsa Indonesia dapat sejajar dengan bangsa Jepang

10. Rumusan sila pertama Pancasila menurut Piagam Jakarta adalah ... .
   a. Ketuhanan Yang Maha Esa
   b. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
   c. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
   d. Peri Ketuhanan

B. *Mengisi titik-titik dengan jawaban yang benar. Kerjakan di buku tugasmu.*

1. Rumusan dasar negara yang otentik terdapat pada... .
2. UUD 1945 disahkan pada tanggal.. .
3. Ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia adalah..............................
4. Ketua BPUPKI adalah... .
5. Panitia sembilan diketuai oleh... .
6. Bhineka Tunggal Ika artinya... .
7. Presiden pertama RI adalah.. .

8. Wakil presiden pertama RI adalah.. .
9. Proklamasi kemerdekaan RI dilakukan oleh.. .
10. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal..

C. Menjawab pertanyaan

1. Sebutkan rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta!
2. Di manakah rumusan Pancasila yang sah dimuat?
3. Jelaskan tugas BPUPKI!
4. Mengapa kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan pribadi?
5. Berikan contoh pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari- hari!

Aktivitasmu



Kerjakan secara mandiri!

PELAKSANAAN PANCASILA

Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara kita. Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat harus melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Masyarakat di kampungmu juga memiliki kewajiban tersebut.

Nah, sekarang lakukan observasi/pengamatan terhadap perilaku masyarakat di kampungmu. Catatlah kesesuaian perilaku mereka dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pilih dua sila saja.

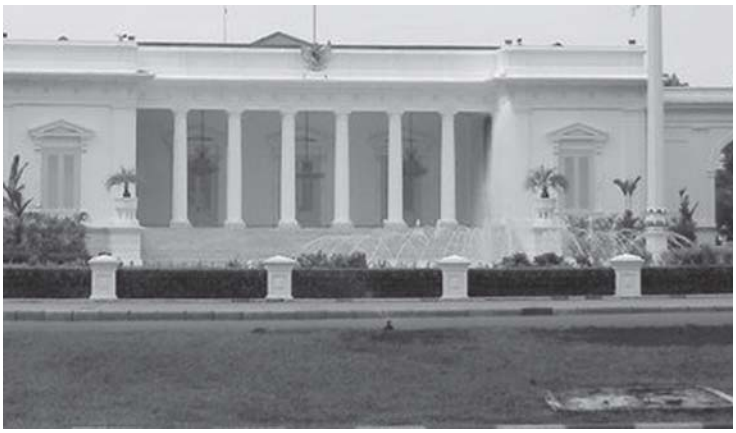
1. Apa saja perilaku masyarakat yang sesuai dengan salah satu sila (misalnya, kemanusiaan yang adil dan beradab)? Minimal 3 perilaku!
2. Apa saja perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan sila tersebut! Minimal 3 perilaku!

Catatlah hasil pengamatanmu dan laporkanlah kepada guru.



Bab II

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA



www.biak.go.id

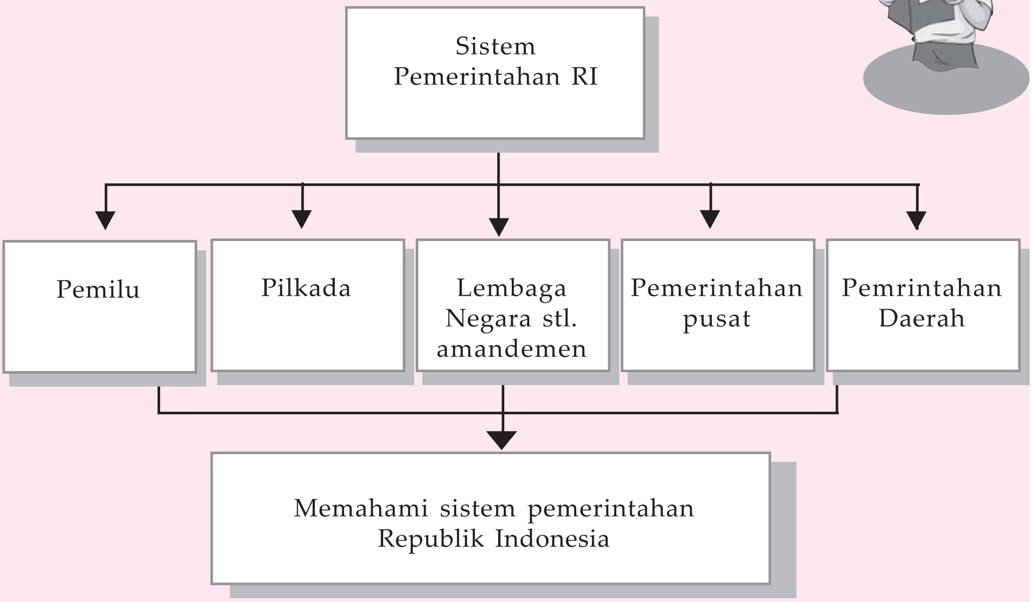


Tujuan Pembelajaran:

Kamu akan mempelajari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Bab ini berisi uraian tentang Pemilu, Pilkada, Lembaga Negara sesudah Amandemen UUD 1945, Pemerintahan Pusat, dan Pemerintahan daerah.

Peta Konsep:







Kata Kunci:

demokrasi, pemilu, pilkada, republik, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat



Renungan

Pernahkah kamu melihat kerajaan? Ataukah kamu mengetahui negara di dunia yang menganut sistem kerajaan/monarki? Apakah kamu akan menyebut negara Inggris? Ya. Betul sekali. Inggris adalah negara yang menganut sistem kerajaan.

Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukanlah negara kerajaan. Negara kita adalah negara republik yang dikepalai oleh seorang Presiden, bukan seorang raja. Negara kita menganut sistem demokrasi. Dalam demokrasi dikenal kompetisi politik yang bersifat terbuka, yaitu melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Kamu sudah tidak sabar mempelajari sistem pemerintahan negara kita? Kamu akan mempelajarinya secara cermat dalam bab ini.



A. Pemilihan Umum

Ayo Menyanyi



Pemilihan Umum
(Moch Embut)

Pemilihan umum telah memanggil kita
Sluruh rakyat menyambut gembira
Hak demokrasi Pancasila
Hikmah Indonesia merdeka
Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya
Pengemban Ampera yang setia
Di bawah Undang-Undang Dasar Empat Lima
Kita menuju ke Pemilihan Umum



www.ebizzasia

Gambar 2.1 Gedung KPU Pusat Jakarta

Dalam negara yang menganut demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, maka rakyat harus diikutsertakan dalam mengelola negara. Pemilu adalah wujud nyata keikutsertaan rakyat dalam mengelola negara. Lewat pemilu rakyat memberikan suaranya untuk memilih orang-orang yang dipercaya untuk memegang kekuasaan negara.

1. Tujuan Pemilu

Tahukah kamu, apa tujuan Pemilu itu?

Pemilu bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat baik yang duduk di DPR, DPD, maupun DPRD. Melalui pemilu juga rakyat memilih presiden dan wakil presiden. Lewat Pilkada rakyat memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ataupun walikota dan wakil walikota.



pilgub-jateng-2008-candiwes

Gambar 2.2 Pemungutan Suara di TPS

2. Asas Pemilu

Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maksud dari asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Langsung artinya setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara.
b. Umum berarti pemilihan itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan asal usulnya.
c. Bebas berarti setiap pemilih dapat menggunakan haknya sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
d. Rahasia berarti pilihan setiap pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh pihak lain, dengan jalan apapun.
e. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Adil berarti setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang adil, bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Jenis-Jenis Pemilu

Tahukah kamu ada bermacam-macam jenis Pemilu?

Secara garis besar Pemilu di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis:

a. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
b. Pemilu eksekutif untuk memilih presiden dan wakil presiden.



maramisetiawan files wordpres.com

Gambar 2.3 Gedung DPR dan MPR Senayan Jakarta

a. Pemilu Legislatif

Tahukan kamu yang dimaksud dengan Pemilu legislatif itu? Pemilu legislatif bertujuan untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam berbagai lembaga perwakilan rakyat, sebagai berikut.

1) anggota DPR,
2) DPD,
3) DPRD Provinsi, dan
4) DPRD Kabupaten /Kota.

Proses meliputi beberapa tahap yang dimulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilu. Secara lengkap sebagai berikut.

1) pendaftaran pemilih;
2) pendaftaran peserta pemilu;
3) penetapan jumlah kursi;
4) pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
5) pemungutan suara dan penghitungan suara;
6) penetapan hasil pemilu.

Proses pemilu diatas terjadi pada tahun 2004 sepanjang sejarah Indonesia. Pada Pemilu 2004, terdapat 24 partai politik yang mengikuti Pemilu Legislatif. Beberapa di antaranya merupakan partai yang sudah mapan. Sebagiannya lagi ada juga partai-partai baru. Pemilu legislatif pada Pemilu 2004 menghasilkan hasil akhir penghitungan suara sebagai berikut:

Tabel
Hasil Pemilu 2004

No	Nama Partai	Jumlah Suara	%
1	PNI Marhanisme	923.159	0.81%
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0.56%
3	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2.62%
4	Partai Merdeka	842.541	0.74%
5	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.746	8.15%
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1.16%
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0.59%
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1.08%
9	Partai Demokrat	8.455.225	7.45%
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1.26%
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0.75%
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0.79%
13	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6.44%
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2.11%
15	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10.57%
16	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	17.3%
17	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2.44%
18	Partai Demokrasi Indonesia Indonesia	21.026.629	18.53%
19	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2.13%
20	Partai Golongan Karya	24.480.757	21.58%
21	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0.95%
22	Partai Serikat Indonesia	679.296	0.60%
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	20.53%
24	Partai Pelopor	878.932	0.77%
Total		**113.462.414**	**100%**

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa Pemilu Legislatif menghasilkan tujuh partai yang secara otomatis menjadi peserta pada Pemilu 2009, yaitu: 1. Partai Golkar, 2. PDI Perjuangan, 3. PKB, 4. PPP, 5. PD, 6. PKS, dan 7. PAN.

b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden



www.kutaikartanegara.com

Gambar 2.4 Pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla

Sebelum tahun 2004 presiden Republik Indonesia dipilih oleh MPR. Akan tetapi, setelah dilakukan amandemen UUD 1945 mulai tahun 2004 presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden dan wapresnya secara langsung oleh rakyat menunjukkan bahwa rakyat sungguh-sungguh terlibat dalam proses kedaulatan rakyat. Tahap-tahap pemilihan presiden dan wakil presiden hampir sama dengan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD.

Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam satu paket. Paket tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.



maramisetiawan files wordpres.com

Gambar 2.5 Kantor Presiden RI

Penghitungan suara dan pengumuman hasil Pilpres dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 hari sejak pemungutan suara. Pasangan calon dengan jumlah suara lebih dari 50 persen akan diumumkan sebagai pemenang.

Jika tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka dilaksanakan Pilpres tahap kedua. Peserta Pilpres tahap kedua ini hanya boleh diikuti pemenang pertama dan kedua saja. Masih ingatkah kamu pada Pilpres 2004 yang diikuti oleh 5 pasang calon? dengan Urutan perolehan suaranya sebagai berikut.

1) pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Yusuf Kalla;
2) pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi;
3) pasangan Wiranto dan Sholahudin Wahid;
4) pasangan Amien Rais dan Siswono Yodho Husodo;
5) pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar.

Berdasarkan urutan perolehan suara seperti di atas, dapatkah kamu menyimpulkan?Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla dan pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi berhak ikut pemilu tahap kedua.

Akhirnya, hasil pemilu tahap kedua dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla dengan 62 persen suara. Hasil perolehan suara ini mengantarkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla menjadi presiden RI 2004-2009.

4. Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkedudukan di Jakarta. Dalam melaksanakan tugas nasional tersebut KPU akan dibantu oleh KPUD, PPK, PPS dan KPPS.

Penyelenggara Pemilu secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU), berkedudukan di Jakarta;
b. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi (KPUD Provinsi) berkedudukan di setiap povinsi;
c. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota (KPUD Kabupaten/Kota) berada disetiap kabupaten dan kota;
d. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), berada di setiap kecamatan;
e. Panitia Pemungutan Suara (PPS), berada di setiap desa/kelurahan; dan
f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berada di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilkada provinsi diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi (KPUD Provinsi). Pilkada kabupaten/kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota (KPUD Kabupaten/Kota).

KPU bersifat independen artinya orang-orang yang menjadi anggota KPU tidak berasal dari partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya KPU memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
b. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyaraka;
c. melaporkan penyelenggaraan pemilu kepada presiden.



Kantor-KPU-1bp1.blogger.com

Gambar 2.6 Kantor KPUD Provinsi

5. Partai Politik Peserta Pemilu

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diakui keberadaannya sesuai dengan UU tentang Partai Politik;
b. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi;
c. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah kabupaten/kota;
d. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang;
e. mengurus partai politik harus memiliki kantor tetap;
f. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
g. mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepaada KPU dan KPUD.



Jago Berpikir

Peserta pemilihan anggota DPR adalah partai politik. Indonesia menganut multi partai, banyak sekali partai politik yang ikut berkompetisi.

Carilah berbagai informasi yang terkait dengan keikutsertaan partai politik pada Pemilu yang lalu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut:

1. Sebutkan nama-nama partai politik yang ikut serta dalam Pemilu yang lalu!
2. Sebutkan secara berurutan partai politik yang menduduki lima besar secara nasional!
3. Siapakah nama Ketua Umum DPP partai politik yang menempati posisi tiga besar pada Pemilu yang lalu?

6. Peserta Pemilu dari Perseorangan

Peserta pemilu perseorangan dimaksudkan untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jika DPR adalah wakil rakyat maka DPD adalah wakil daerah. Jumlah anggota DPD 4 orang setiap provinsi. Pada tahun 2004 ada 32 provinsi di Indonesia yang mengikuti pemilu. Menurut ketentuan UUD jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah seluruh anggota DPR.

Selanjutnya, dimana letak DPD ini? DPD adalah bagian dari anggota MPR. Menurut UUD 1945 hasil amandemen anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah seluruh anggota DPD.

Peserta perseorangan bisa menjadi anggota DPD jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Provinsi yang berpenduduk kurang dari 1 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 orang pemilih.
b. Provinsi yang berpenduduk lebih 1 juta orang sampai 5 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 orang pemilih.
c. Provinsi yang berpenduduk 5 juta orang sampai 10 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 orang pemilih.
d. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 10 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 orang pemilih.

Syarat untuk menjadi anggota DPD sama seperti calon anggota DPR dan DPRD. Calon anggota DPD harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut. Calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan calon.

7. Pengawas Pemilu

Penyelenggaraan pemilu harus disertai dengan suatu sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dulu disebut Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu). Keberadaan Bawaslu mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan. Bawaslu dibentuk oleh KPU. Bawaslu dari tingkat pusat sampai kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai .Tugas Bawaslu berakhir selambat-lambatnya 1 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.

Tugas dan kewenangan Pengawas Pemilu antara lain:

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu;
b. menerimma laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu;
c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu;
d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Laporan pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pemilu dapat dilakukan oleh warga negara yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan atau peserta pemilu. Laporan bersifat sengketa, tetapi tidak mengandung unsur pidana akan diselesaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, bila laporan tersebut mengandung unsur pidana maka akan diteruskan kepada polisi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), badan hukum, dan perwakilan pemerintah luar negeri dimungkinkan untuk menjadi pemantau pemilu. Namun, harus memperoleh ijin dari KPU.



Gambar 2.7 Kampanye Pemilu

8. Kampanye Pemilu

Ada dua jenis kampanye:

a. kampanye dengan mengerahkan massa;

b. kampanye dengan cara dialog.

Kampanye dengan cara mengerahkan massa biasanya dilakukan dengan pawai di jalan raya, maupun berkumpul di lapangan. Cara ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa simpatisan suatu partai jumlahnya banyak. Cara ini sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Kampanye dengan cara dialog dilakukan dengan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, lewat radio, TV dan rapat umum. Yang terpenting dalam kampanye model ini terjadi dialog antara petinggi partai dan pemilih. Ciri lainnya juru kampanye menyampaikan program.

Tindakan atau perilaku yang dilarang dalam kampanye:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain;

c. menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;

d. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.



www.parpol.blogspot.com

Gambar 2.8 Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu



Jago Berlatih

Berlatihlah menjawab pertanyaan di bawah ini.

1. Apa tujuan pelaksanaan Pemilihan Umum?
2. Jelaskan maksud BEBAS dalam asas Pemilu!
3. Apa saja pemilihan yang dilaksanakan dalam Pemilu legislatif?
4. Sejak kapan Pemilihan Presiden di Indonesia dilaksanakan secara langsung?
5. Sebutkan secara lengkap penyelenggara Pemilu di Indonesia!

Ayo berlatih mengisi titik-titik pada pernyataan berikut ini sehingga membentuk kalimat yang benar! Kerjakan di buku tugasmu.

1. Presiden Republik Indonesia sekarang tidak lagi dipilih oleh ... .
2. Pasangan calon dengan jumlah suara lebih dari ... akan diumumkan sebagai pemenang dalam ... .
3. Pada Pilpres 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono adalah ...., sedangkan pasangan Hamzah Has adalah ....
4. Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat bernama ....
5. Peserta dalam pemilihan anggota DPD bukan ....akan tetapi ....



B. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)



www.singkawang.us

Gambar 2.9 Kampanye Pilkada DKI Jakarta

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi, kabupaten dan kota. Pilkada diatur dalam UU No 32 tahun 2004. Sebutan kepala daerah provinsi adalah gubernur dan wakil gubernur. Di kabupaten, bupati dan wakil bupati. Di kota, walikota dan wakil walikota.

Pilkada diaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada provinsi dilaksanakan oleh KPUD Provinsi. Pilkada kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten/Kota. Tahap-tahap persiapan Pilkada:

1. pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2. pendaftaran dan penetapan pemilih;
3. pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
4. pelaksanaan kampanye;
5. pemungutan suara;
6. penghitungan suara.

1. Jenis-Jenis Pilkada

Tahukah kamu ada bermacam-macam jenis Pilkada?

Secara garis besar Pilkada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2jenis:

a. pilkada provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur;
b. pilkada kabupaten/kota untuk memilih bupati dan wakil bupati ataupun walikota dan wakil walikota.

2. Penyelenggara Pilkada

Pilkada provinsi diselenggarakan oleh KPUD provinsi. Pilkada kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPUD kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD provinsi dan KPUD kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

a. PPK berkedudukan di kecamatan;
b. PPS berkedudukan di setiap desa/kelurahan;
c. KPPS bertugas disetiap tempat pemungutan suara (TPS).



www.jawapos.com

Gambar 2.10 Pelantikan Gubernur

3. Persyaratan Calon Kepala Daerah

Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah?

a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bekurang-kurangnya berpendidikan SLTA;
d. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran;
e. sehat Jasmani dan rohani;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara; tidak sedang dicabut hak pilihnya.

4. Pelaksanaan kampanye

Kampanye pilkada dilaksanakan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Jadwal kampanye ditentukan oleh KPUD. Kampanye dapat dilakukan:

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka dan dialog;
c. penyiaran melalui radio dan televisi;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. debat publik/debat terbuka antar calon.

Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye. Materi kampanye ini diwujudkan dalam program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Bila pasangan calon terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah maka program pasangan calon tersebut menjadi dokumen resmi daerah.



www.singkawang.us

Gambar 2.11 Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota

Bermain Peran

KAMPANYE PILKADA

1. Bertindaklah seolah-olah kamu adalah seorang juru kampanye yang sedang mengajak para pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon kepala daerah!
2. Jangan lupa, tawarkan program-program unggulan yang ditawarkan oleh pasangan calon tersebut di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

5. Pemungutan Suara

Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara. Surat suara berisikan nomor, foto, dan nama pasangan calon dengan cara mencoblos salah satu gambar sesuai pilihannya. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Terdapat bantuan bagi pemilih tunanetra atau yang memiliki kelainan fisik lain.Ketua KPPS dapat menugaskan anggota KPPS untuk memberikan bantuan.Petugas tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta pada salah satu jari tangannya.


www.suaramerdeka.com

Gambar 2.12 Penghitungan Suara di TPS

6. Penghitungan Suara

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Penghitungan suara dihadiri oleh saksi wakil calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka sehingga semua yang hadir dapat menyaksikan.

Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara di TPS. Selanjutnya segala kelengkapan serta berita acara diserahkan kepada PPS. PPS menyerahkan ke PPK, dan PPK menyerahkan ke KPUD.

Sebaiknya Kamu Tahu



Selama tahun 2005 telah terselenggara Pemilihan Kepala Daerah sebanyak 201, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Hampir seluruh penyelenggaraan Pilkada tersebut berlangsung satu putaran. Hanya Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota yang berlangsung dua putaran, yakni: Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tidore, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Kepulauan Aru (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada_2005).

Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah. Pilkada tersebut dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan rakyat di masing-masing daerah.



Jago Berlatih

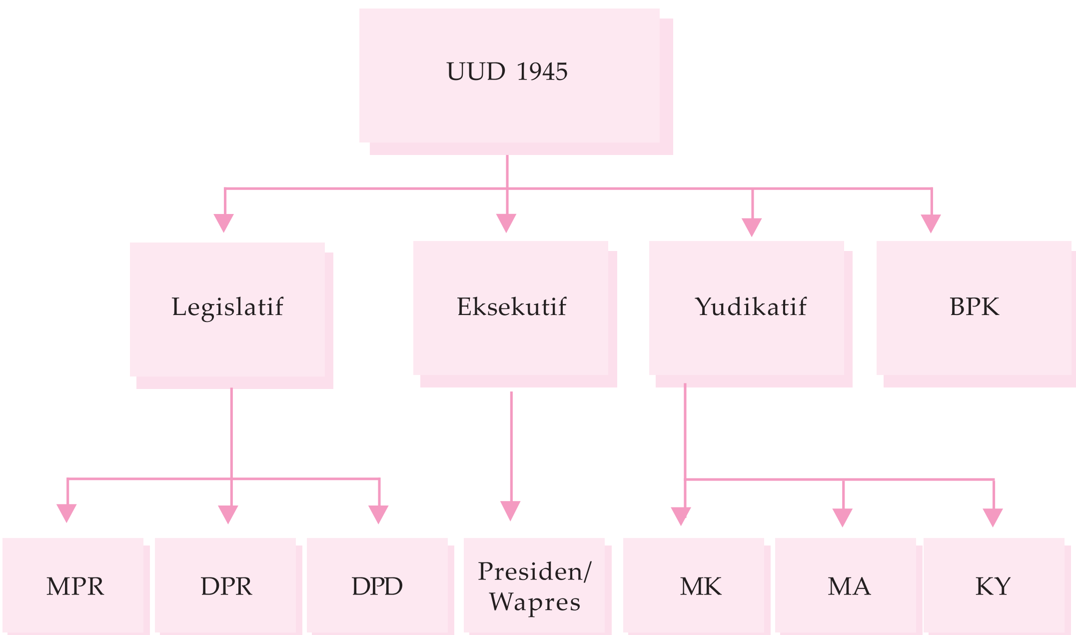
Cobalah berlatih menjawab pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan jenis-jenis Pilkada!
2. Apa nama lembaga penyelenggara Pilkada di tingkat provinsi?
3. Jelaskan asas Pilkada!
4. Siapakah yang melaksanakan penghitungan suara di tingkat TPS?
5. Kapan pemungutan suara dilakukan untuk Pemilihan Kepala Daerah?



C. Lembaga-Lembaga Negara Berdasar UUD 1945 Hasil Amandemen

Bagan Lembaga Negara RI



Lembaga apa saja yang diberi mandat oleh UUD, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat?

1. Untuk membuat peraturan perundang-undangan dipercayakan kepada lembaga legislatif. Lembaga legislative terdiri dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
2. Untuk melaksanakan undang-undang dipercayakan kepada presiden. Presiden dikenal sebagai lembaga eksekutif.
3. Untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan diserahkan pada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).



www.dpr.go.id

Gambar 2.13 Pelantikan Anggota MPR RI

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Menurut Pasal 3 UUD 1945, tugas dan wewenang MPR adalah:

a. mengubah dan menetapkan UUD;
b. melantik presiden dan/atau wakil presiden;
c. hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MPR hasil pemilu tahun 1999 telah melakukan amandemen UUD 1945. MPR juga telah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR. Di samping itu, MPR juga berwenang melantik wakil presiden menjadi presiden.Hal tersebut dilakukan apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Disamping kewenangan-kewenangan tersebut, MPR diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode Etik MPR. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan MPR tersebut, anggota MPR di lengkapi dengan hak dan kewajiban sebagai berikut.



www.csuchico.com

www.mpr.go.id

Gambar 2.14 Sidang MPR

Anggota MPR memiliki beberapa hak dan kewajiban. Hak anggota MPR adalah:

a. mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD;
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
c. memilih dan dipilih;
d. membela diri;
e. imunitas;
f. protokoler;
g. keuangan dan administratif.

Sedangkan kewajiban anggota MPR sebagai berikut:

a. mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan;
c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan daerah.

Sebagai pelaksana peran wakil rakyat (DPR) dan daerah (DPD) ini berarti MPR terdiri dari DPR dan DPD. Oleh karena itu MPR dikenal sebagai forum bersama antara kedua lembaga tersebut.



Gambar 2.15 gedung DPR dan MPR Senayan Jakarta

2. Presiden

Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Artinya, kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD. Pembatasan kekuasaan presiden itu misalnya menyangkut masa jabatannya dan cakupan kekuasaannya.

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Apa saja kekuasaan presiden itu? Menurut UUD 1945 kekuasaan presiden meliputi:

a. hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR;
b. menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang;
c. memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara;
d. presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
e. presiden menyatakan keadaan bahaya;
f. mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
g. memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan MA (Mahkamah Agung);
h. memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR;
i. memberi tanda gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan;
j. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden;

k. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara;
l. mengajukan rancangan undang-undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).



Gambar 2.16 Pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wapres Jusuf Kalla

Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya jika telah memenuhi syarat-syarat seabagai berikut:

a. melakukan pelanggaran hukum berupa pengkianatan terhadap negara;
b. melakukan korupsi;
c. melakukan penyuapan;
d. melakukan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela;
e. terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

Pemberhentian presiden dan wakil presiden tidaklah mudah. Sebelum mengajukan usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden, mahkamah konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR RI. Apakah presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran seperti tertulis di atas.

Jika terbukti maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden kepada MPR. Keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota. Keputusan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat berkedudukan sebagai lembaga negara. Apa fungsi DPR itu? Fungsi DPR menurut UUD 1945 mencakup fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

a. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
b. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
c. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsinya, maka DPR diberikan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

a. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah.
b. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah.

Hak menyatakan pendapat selain diarahkan kepada kebijakan pemerintah juga bisa diarahkan pada:

a. kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional di serta rekomendasi penyelesaiannya;
b. sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi;
c. terhadap dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.



www.dpr.go.id

Gambar 2.17 *Sidang DPR tengah membahas suatu undang-undang*

DPR dalam menjalankan tugas sehari-hari terbagi dalam komisi-komisi. Setiap komisi mempunyai lingkup kerja sendiri-sendiri. Mereka biasanya bekerja sama dengan instansi pemerintah atau masyarakat. Perhatikan tugas-tugas dari setiap komisi dalam tabel berikut ini!

No	Komisi	Ruang Lingkup Kerja
1	Komisi I	Bidang luar negeri, pertahanan, dan informasi
2	Komisi II	Bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan aparatur negara
3	Komisi III	Bidang hukum dan keamanan
4	Komisi IV	Bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan
5	Komisi V	Bidang perhubungan, telekomunikasi, dan pekerjaan umum
6	Komisi VI	Bidang industri, perdagangan, investasi, dan BUMN
7	Komisi VII	Bidang pertambangan dan lingkungan hidup
8	Komisi VIII	Bidang sosial, agama, dan pemberdayaan perempuan
9	Komisi IX	Bidang kesehatan dan tenaga kerja
10	Komisi X	Bidang pendidikan, pemuda, dan olah raga
11	Komisi XI	Bidang keuangan dan perbankan
12	Panitia Anggaran	Seputar RAPBN. RAPBN diajukan oleh pemerintah untuk dibahas bersama anggota DPR sampai ditetapkan menjadi UU tentang APBN

Berkaitan dengan tugas sehari-hari, anggota DPR memiliki hak-hak antara lain sebagai berikut:

a. Hak menyampaikan usul dan pendapat. Yaitu hak anggota DPR untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah atau DPR sendiri dengan memperhatikan tata krama, etika, dan sopan santun,sehingga ada kemandirian dan tanpa campur tangan dari siapapun dalam membuat keputusan.
b. Hak Imunitas. Yaitu hak anggota DPR untuk kebal dari tuntutan di muka pengadilan kerena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalamrapat-rapat DPR, baik dengan pemerintah dan atau rapat-rapat DPR lainnya.
c. Hak bertanya secara lisan maupun tertulis. Yaitu hak anggota DPR untuk bertanya berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR.

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai lembaga negara.



www.rspoinawiwg.org

Gambar 2.18 Anggota DPD tengah mengikuti sidang di MPR. Setiap provinsi diwakili 4 orang anggota DPD.

DPD bersama-sama dengan DPR berhak untuk:

a. membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah;
b. membahas masalah hubungan pusat dan daerah;
c. membahas masalah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi;
d. masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah;
e. mengajukan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama.



Jago Berpikir

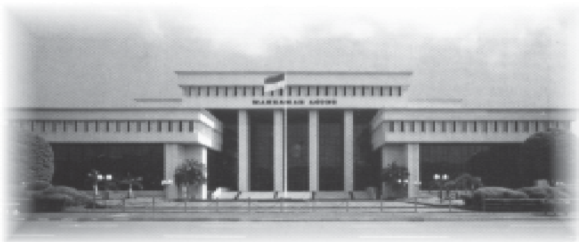
DPD merupakan lembaga negara yang anggota-anggotanya mewakili setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jawablah pertanyaan mengenai anggota DPD di daerahmu, berikut ini:

1. Siapakah nama-nama anggota DPD yang mewakili daerahmu?
2. Seandainya kamu sempat bertemu dengan salah satu anggota tersebut, aspirasi apakah yang akan kamu sampaikan?
3. Apa yang harus dilakukan oleh Anggota DPD jika ada aspirasi dari warga daerah yang diwakilinya?

5. Mahkamah Agung (MA)

MA (Mahkamah Agung) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, bersama MK (Mahkamah Konstitusi) memiliki peran untuk melakukan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (peran penghakiman terhadap peraturan). Mahkamah Agung berwenang:

a. mengadili pada tingkat kasasi,
b. menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.



Gambar 2.19 Gedung Mahkamah Agung di Jakarta.

6. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi berwenang:

a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
c. memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.



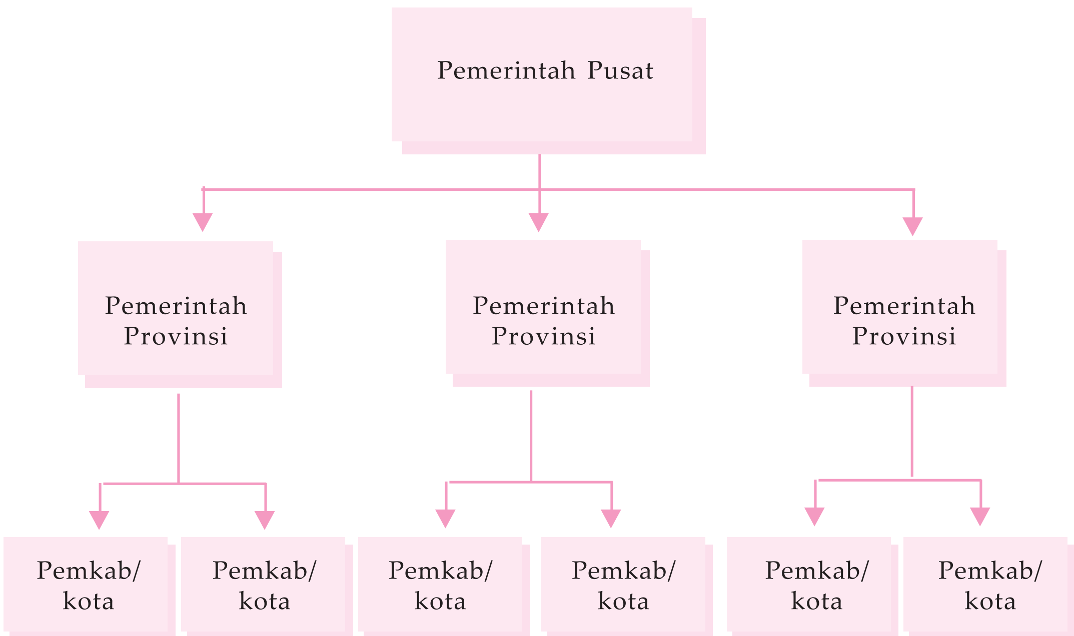
Gambar 2.20 Sidang Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil pemilu.

Jago Berlatih

Isilah tabel tentang lembaga-lembaga negara di bawah ini!

No	Lembaga Negara	Tugas/Wewenang/Kekuasaan
1	Presiden	
2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	
3	Dewan Perwakilan Rakyat	
4	Dewan Perwakilan Daerah	
5	Mahkamah Agung	

D. Pemerintahan Pusat



1. Presiden

Presiden mempunyai kekuasaan dan kewenangan seperti yang telah ditetapkan oleh UUD 1945. Presiden RI memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Sebagai kepala negara, seorang presiden mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
b. dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
c. menyatakan keadaan bahaya;
d. mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
e. menerima duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
f. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA;
g. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
h. memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Sebagai kepala pemerintahan, presiden RI memiliki kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut:

a. mengajukan rancangan UU kepada DPR;
b. menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan UU;
c. menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), dalam hal kegentingan yang memaksa;
d. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

Kewenangan presiden sangat besar dan tugasnya amat berat, maka harus dipilih orang yang memiliki kemampuan. Apakah kamu bercita-cita jadi presiden RI? Silakan. Di negara demokrasi, setiap warga negara berhak untuk menjadi orang nomor satu di republik ini.

2. Wakil Presiden

Sejak tahun 2004 calon wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam satu paket dengan calon presiden. Tugas dan wewenang wakil presiden adalah sebagai berikut:

a. membantu presiden melakukan tugasnya;
b. mengganti presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Selain membantu presiden dalam melakukan tugasnya, wakil presiden melakukan pengawasan operasional. Hal tersebut dilakukan dengan bantuan departemen-departemen yang dilaksanakan oleh inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan.

Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementrian terdiri dari menteri koordinator, menteri yang memimpin departemen, menteri nondepartemen dengan tugas khusus, dan pejabat tinggi setingkat menteri.

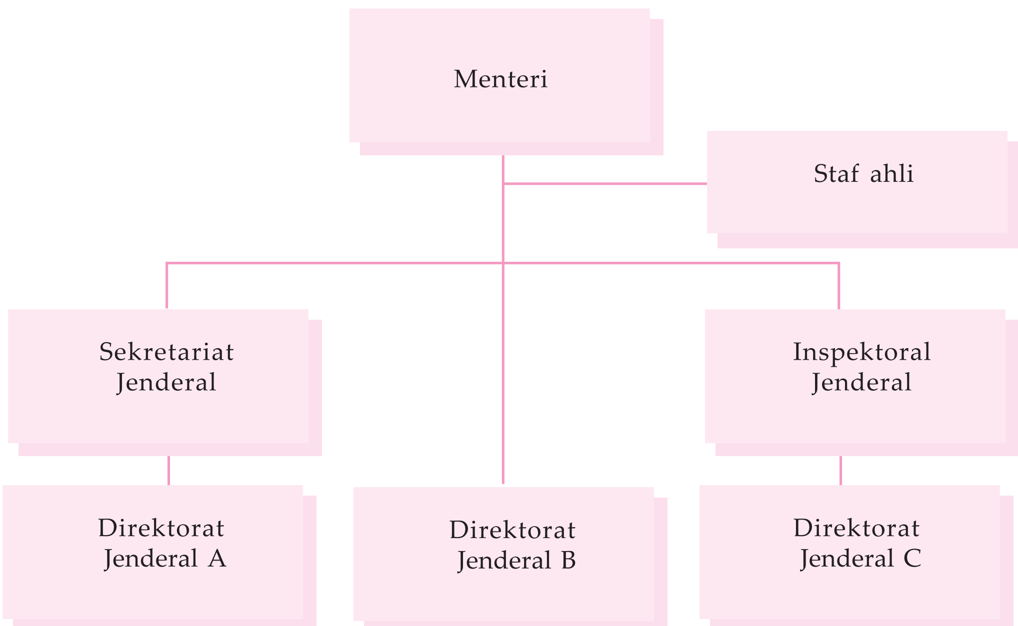
3. Menteri Koordinator

Menteri koordinator (Menko) bertugas untuk mengkoordinasikan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat lintas departemen. Ada 3 Menko dalam kabinet Indonesia Bersatu:

a. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam);
b. Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian);
c. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).

4. Menteri yang Memimpin Departemen

Bagan Organisasi Departemen



a. Menteri Dalam Negeri;
b. Menteri Luar Negeri;
c. Menteri Pertahanan;
d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
e. Menteri Keuangan;
f. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
g. Menteri Perindustrian;
h. Menteri Perdagangan;
i. Menteri Pertanian;
j. Menteri Kehutanan;
k. Menteri Perhubungan;
l. Menteri Kelautan dan Perikanan;
m. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
n. Menteri Pekerjaan Umum;
o. Menteri Kesehatan;
p. Menteri Pendidikan Nasional;
q. Menteri Sosial;
r. Menteri Agama.

5. Menteri Negara Nondepartemen dengan Tugas Khusus

a. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
b. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
c. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
e. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
f. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara;
g. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
h. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas;
i. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
j. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
k. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
l. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.

6. Pejabat Tinggi Setingkat Menteri

Pejabat tinggi setingkat menteri yang membantu kelancaran tugas-tugas kepresidenan adalah:

a. Sekretaris Negara;
b. Sekretaris Kabinet;
c. Jaksa Agung.

7. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berada langsung di bawah menteri, dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen). Tugas pokoknya adalah:

a. menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan departemen;
b. memberikan pelayanan administrative kepada menteri, direktur jenderal, inspektorat jenderal, dan unit organisasi lainya di lingkungan departemen;
c. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing kepala biro;
d. menyampaikan laporan berkala kepada menteri, tentang keadaan departemen.

8. Direktur Jenderal

Direktorat jenderal berada langsung di bawah menteri. Dipimpin oleh seorang direktur jenderal (Dirjen). Tugas pokok direktorat jenderal adalah melaksanakan sebagian tugas pokok departemen di bidangnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri.

Direktorat jenderal dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:

a. memberi petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan direktur, serta pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya;
b. mengadakan kerja sama dan konsultasi dengan Sekjen, Irjen, dan dirjen lainnya, serta pimpinan unit organisasi lain dalam lingkungan departemen.

9. Inspektorat Jenderal

Inspektorat jenderal adalah unsur pengawasan dalam departemen yang berada langsung di bawah menteri. Inspektorat jenderal dipimpin oleh seorang inspektur jenderal (Irjen).

Tugas pokok inspektorat jenderal adalah melakukan pengawasan dalam lingkungan departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Jago Berlatih

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan pejabat tinggi negara setingkat menteri!
2. Apa tugas pokok dari inspektorat jenderal?
3. Sebutkan lima saja menteri yang memimpin departemen!
4. Apa saja kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan?
5. Ada berapakah menteri koordinator dalam kabinet pemerintah saat ini? Sebutkan!



E. Pemerintah Daerah Provinsi

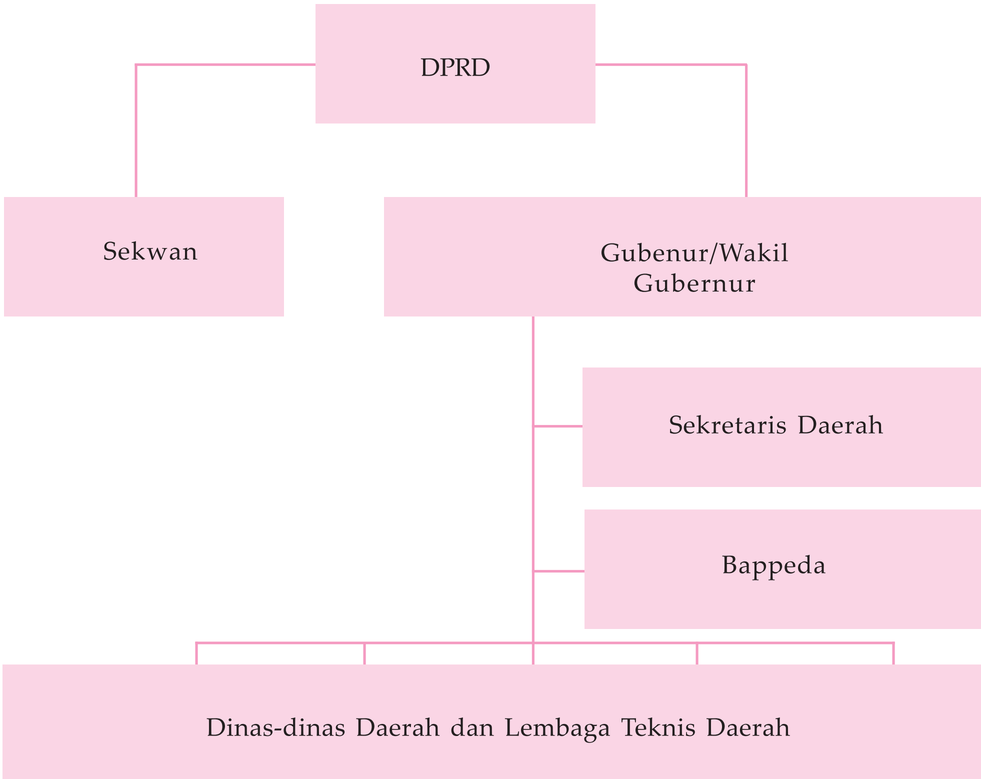


www.bkpmd.malutprov.go.id

Gambar 2.21 Gedung Kantor Gubernur

Provinsi adalah nama sebuah pembagian wilayah administrasi di bawah wilayah nasional. Gubernur adalah kepala daerah untuk daerah provinsi. Gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi:



Tahukah kamu bagaimana gubernur dan wakilnya dipilih? Mereka dipilih sebagai satu pasangan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah masing-masing. Pemilihan dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Langsung artinya saat memberikan suara, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Umum artinya bahwa pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah pada waktu yang sama. Bebas artinya pemilih boleh memilih siapa saja sesuka hatinya. Ia tidak boleh dipaksa. Rahasia artinya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dipilih oleh pemilih.

Sebaiknya Kamu Tahu



Syarat Pemilih

Tidak semua penduduk berhak ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Syarat-syarat pemilih sebagai berikut:

1. warga daerah, berusia 17 tahun atau sudah menikah;
2. terdaftar sebagai pemilih;
3. tidak sedang terganggu jiwanya
4. tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Tugas gubernur:

1. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Pemerintahan Daerah Provinsi, juga dikenal lembaga DPRD Provinsi. DPRD Provinsi merupakan lembaga legislatif. Lembaga ini merupakan mitra kerja pemerintah yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Bersama-sama dengan gubernur, DPRD membuat Peraturan Daerah (Perda). DPRD juga bertugas mmembahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Jago Berpikir

Sebagaimana di propinsi lain di daerahmu, pasti ada gubernur dan ada juga DPRD Provinsi. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut, dan tuliskanlah di selembar kertas, kemudian setorkan kepada gurumu.

1. Siapa nama gubernur di daerahmu?
2. Berasal dari parpol apakah gubernur yang saat ini menjabat di daerhamu?
3. Siapakah nama ketua DPRD Provinsi di daerahmu?
4. Berasal dari partai apakah beliau?
5. Berilah penilaian atas kinerja gubernur dan ketua DPRD Provinsi, sesuai dengan apa yang kamu ketahui!

F. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



www.jabar.go.id

Gambar 2.22 Kantor Bupati/Walikota

Wilayah kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan. Wilayah kabupaten sebagian besar berupa wilayah pedesaan. Wilayah kota biasanya terdiri dari wilayah perkotaan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah kabupaten/kota menggunakan asas otonomi. Artinya, pemerintah kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai hak sebagai berikut:

1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. memilih kepala daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah.

Kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

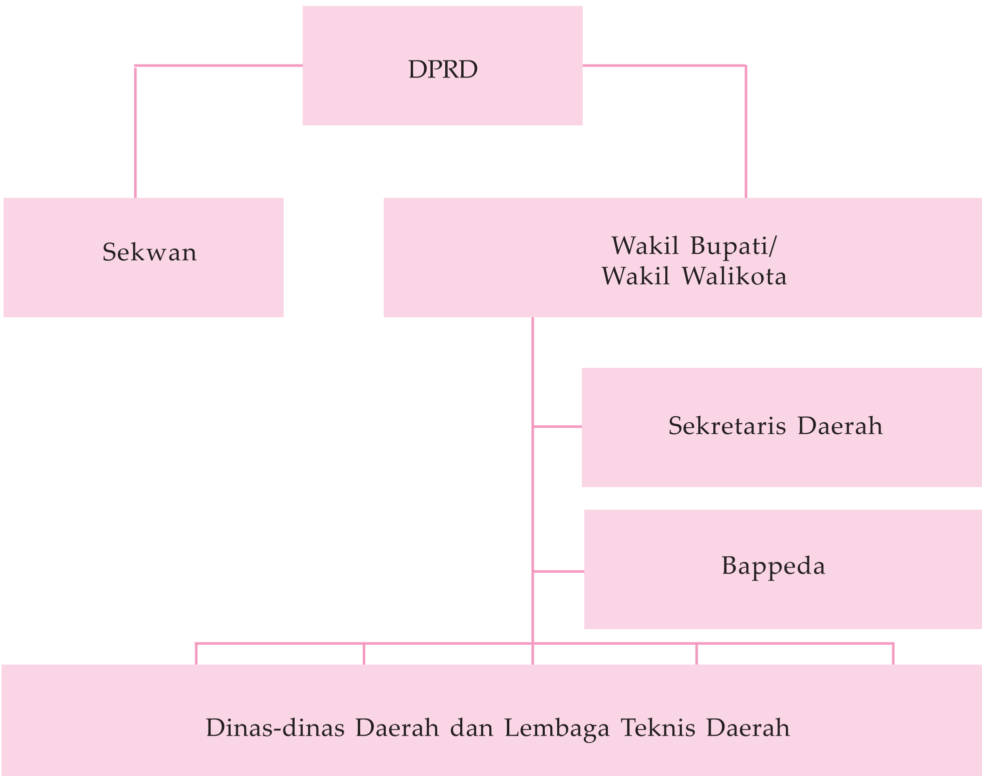
1. melindungi masyarakat, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.



www.komunitaspers.blog.dada.com

Gambar 2.23 Pelantikan Bupati/Walikota

Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota:



Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah yang disebut kepala daerah. Pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan pemerintah kota dipimpin oleh seorang wali kota. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari seorang bupati dibantu oleh seorang wakil bupati. Begitu juga seorang walikota juga dibantu seorang wakil walikota.

Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebelum pemilihan kepala daerah dilakukan, para calon bupati/walikota serta wakilnya diberi kesempatan berkampanye untuk menawarkan program. Masing-masing calon merupakan calon yang diajukan partai politik yang ada di daerah tersebut. Pemerintah kota yang memiliki DPRD, pemilihan walikota dan wakilnya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemerintah kota yang tidak mempunyai DPRD,tetapi walikotanya diangkat oleh menteri dalam negeri atas usul gubernur.

Bupati/walikota adalah pimpinan dalam pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil wali kota. Kedudukan bupati/wali kota sejajar dengan DPRD. Kedua lembaga ini saling bekerja sama untuk memajukan daerahnya.



www.bojonegoro.go.id

Gambar 2.24 Gedung DPRD Kabupaten/Kota

Di samping Bupati/walikota ada juga lembaga DPRD Kabupaten/ Kota. DPRD merupakan lembaga legislatif. Lembaga ini merupakan mitra kerja pemerintah yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Bersama-sama dengan bupati/walikota, DPRD membuat Peraturan Daerah (Perda). DPRD juga bertugas membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Jago Berlatih

Cobalah berlatih menjawab pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan dua dari hak kabupaten/kota dalam otonomi daerah!
2. Yang kamu ketahui,apa saja kewajiban kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah?
3. Siapa yang mencalonkan calon bupati/walikota dalam pemilihan kepala daerah kabupaten/kota?
4. Apa nama lembaga legislatif di tingkat kabupaten/kota?
5. Dalam membantu jalannya pemerintahan, bupati/walikota dipimpin oleh berapa orang wakil?

Rangkuman



1. Kedaulatan tertinggi di negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen.
2. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, MA dan DPD.
3. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
4. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara diatur dalam UUD 1945.
5. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Kepala pemerintahan daerah provinsi adalah gubernur, kepala pemerintahan daerah kabupaten adalah Bupati, kepala daerah kota adalah Walikota.
7. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
8. Pemerintah pusat terdiri dari presiden, wakil presiden dan pembantu-pembantunya.
9. Peran atau tugas dan wewenang MPR menurut Pasal 3 UUD 1945 adalah.
   a. mengubah dan menetapkan UUD;
   b. melantik presiden dan/atau wakil presiden;
   c. hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

10. Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
11. Menurut UUD 1945 kekuasaan presiden meliputi:
    a. hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR;
    b. menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan UU;
    c. memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara;
    d. presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
    e. presiden menyatakan keadaan bahaya;
    f. mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
    g. memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan MA;
    h. memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR;
    i. memberi tanda gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan;
    j. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden;
    k. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara;
    l. mengajukan rancangan undang-undang APBN.
12. DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Fungsi DPR menurut UUD 1945 mencakup fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
13. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai lembaga negara.
14. Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, bersama MK (Mahkamah Konstitusi) memiliki peran untuk melakukan kekuasaan kehakiman.
15. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang:
    a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar,
    b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar,
    c. memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.



Uji Kompetensi

Ayo mengukur kemampuanmu dalam memahami materi yang telah kamu pelajari. Kemampuanmu dapat kamu ukur dengan mengerjaan soal-soal berikut. Selanjutnya, mintalah saran kepada gurumu apakah kemampuanmu sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan.

A. Memilih a, b, c, atau d sebagai jawaban yang tepat

1. Negara Indonesia berbentuk….
   a. republik
   b. federal
   c. kerajaan
   d. monarki
2. merupakan salah satu tugas MPR adalah….
   a. mengubah dan menetapkan UUD
   b. menyusun RAPBN
   c. membuat undang-undang
   d. mengesahkan undang-undang
3. DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut……
   a. hak menyatakan pendapat
   b. hak interpelasi
   c. hak angket
   d. hak budget
4. DPR memegang kekuasaan untuk….
   a. mengajukan usul Perpu
   b. memberhentikan presiden dan wakil presiden
   c. menetapkan peraturan pemerintah
   d. membuat UU
5. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui….
   a. pemilihan umum
   b. sidang umum MPR
   c. pemungutan suara di DPR
   d. perwakilan daerah kabupaten

6. Menurut UUD 1945 yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah….
    a. MPR
    b. DPR
    c. DPD
    d. presiden
7. Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh….
    a. seluruh anggota MPR
    b. seuruh anggota DPD
    c. seuruh anggota DPR
    d. seuruh rakyat yang memiliki hak pilih
8. Yang bukan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah….
    a. MA
    b. KY
    c. MK
    d. Departemen Kehakiman
9. Calon Hakim Agung diusulkan oleh KY kepada….
    a. MA
    b. MK
    c. Menteri Kehakiman
    d. DPR
10. Jika ada perselisihan tentang hasil pemilu maka yang berwenang mengadili dan memutuskan adalah…..
    a. MA
    b. KY
    c. MK
    d. Panwaslu
11. Lembaga negara yang berhak menguji secara material peraturan di bawah UU adalah….
    a. DPR
    b. KPU
    c. BPK
    d. MA
12. Kabinet yang dipimpin presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009 bernama….
    a. Gotong royong
    b. Pembangunan
    c. Indonesia Bersatu
    d. Reformasi
13. DPR memiliki kekuasaan membentuk UU, maka disebut lembaga…..
    a. eksekutif
    b. legislatif
    c. yudikatif
    d. federatif

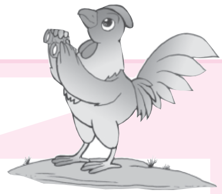
14. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK dilaporkan kepada.....
    a. DPR
    b. presiden
    c. DPD
    d. MA

15. Anggota MPR terdiri dari.....
    a. seluruh anggota DPR dan DPD
    b. seluruh anggota DPR dan BPK
    c. seluruh anggota DPR dan DPRD
    d. seluruh anggota DPR dan utusan daerah

B. Menjawab pertanyaan

1. Sebutkan syarat-syarat untuk menjadi presiden Republik Indonesia!
2. Sebutkan kewenangan MPR!
3. Jelaskan tugas Komisi Yudisial!
4. Apa saja wewenang mahkamah konstitusi?
5. Sebutkan asas pemilihan umum!

Aktivitasmu



Kerjakan secara berkelompok!

KLIPING KORAN

- Buatlah kelompok kerja yang beranggotakan maksimal 5 orang!
- Bagilah tugas kepada masing-masing untuk mengkliping berita di koran mengenai lembaga-lembaga negara dalam 4 hari.
- Tempellah kliping korang yang kamu dapatkan di atas kertas folio.
- Diskusikan kinerja lembaga-lembaga negara yang ada di klipingmu.
- Laporkan hasil kerja kelompokmu kepada guru (kliping koran serta komentar hasil diskusi kelompokmu).
- Selamat beraktivitas!



Latihan Ulangan Semester 1

Ayo mengukur kemampuan selama satu semester dengan mengerjakan perintah-perintah di bawah ini. Setelah itu gurumu akan memberikan evaluasi apakah kemampuanmu sudah mencapai target yang diinginkan atau masih perlu ditingkatkan.

A. *Memilih a, b, c, atau d sebagai jawaban yang tepat!*

1. Urutan sila Pancasila yang resmi sesuai dengan....
   a. Piagam Jakarta
   b. usulan Ir. Soekarno
   c. usulan Moh Yamin
   d. Alinea 4 UUD 1945
2. Piagam Jakarta dirumuskan oleh....
   a. panitia sembilan
   b. seluruh anggota BPUPKI
   c. seluruh anggota PPKI
   d. tokoh kemerdekaan
3. BPUPKI dibentuk tanggal....
   a. 1 Maret 1945
   b. 29 Mei 1945
   c. 1 Juni 1945
   d. 22 Juni 1945
4. Ketua BPUPKI adalah....
   a. Ir. Soekarno
   b. Drs. Moh. Hatta
   c. Dr. Rajiman Wedyodiningrat
   d. Mr. Moh. Yamin
5. Gambar pohon beringin pada lambang negara Indonesia merupakan simbol dari sila....
   a. Ketuhanan Yang Maha Esa
   b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
   c. Persatuan Indonesia
   d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
6. Tanggal 1 Juni seharusnya kita peringati sebagai hari....
   a. lahirnya Pancasila
   b. kesaktian Pancasila
   c. disyahkannya UUD 1945
   d. disyahkannya dasar negara

7. Tokoh pengusul dasar negara yang berasal dari Sumatera Barat adalah….
   a. Drs. Moh. Hatta
   b. Mr. Moh. Yamin
   c. K.H. Wahid Hasyim
   d. Haji Agus Salim
8. Nilai-nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasuila berasal dari ….
   a. pemikiran para tokoh nasional
   b. nilai luhur budaya bangsa Indonesia
   c. adat dan budaya suku Jawa
   d. usulan perdana menteri Jepang
9. Jepang memberi janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan maksud agar….
   a. membantu Indonesia agar bebas dari penjajahan Belanda;
   b. bangsa Indonesia bersemangat membantu Jepang dalam melawan Sekutu;
   c. rakyat Indonesia tidak melawan kepada Jepang;
   d. bangsa Indonesia dapat sejajar dengan bangsa Jepang.
10. Negara Indonesia berbentuk….
    a. republik
    b. federal
    c. kerajaan
    d. monarki
11. Rumusan sila pertama Pancasila menurut Piagam Jakarta adalah……..
    a. Ketuhanan Yang Maha Esa
    b. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
    c. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
    d. Peri Ketuhanan
12. merupakan salah satu tugas MPR adalah…
    a. mengubah dan menetapkan UUD
    b. menyusun RAPBN
    c. membuat undang-undang
    d. mengesahkan undang-undang
13. DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut….
    a. hak menyatakan pendapat
    b. hak interpelasi
    c. hak angket
    d. hak budget

14. DPR memegang kekuasaan untuk....
    a. mengajukan usul Perpu
    b. memberhentikan presiden dan wakil presiden
    c. menetapkan peraturan pemerintah
    d. membuat UU
15. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui....
    a. pemilihan umum
    b. sidang umum MPR
    c. pemungutan suara di DPR
    d. perwakilan daerah kabupaten
16. Menurut UUD 1945 yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah....
    a. MPR
    b. DPR
    c. DPD
    d. Presiden
17. Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh....
    a. seluruh anggota MPR
    b. seuruh anggota DPD
    c. seuruh anggota DPR
    d. seuruh rakyat yang memiliki hak pilih
18. Yang bukan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah....
    a. MA
    b. KY
    c. MK
    d. Departemen Kehakiman
19. Jika ada perselisihan tentang hasil pemilu maka yang berwenang mengadili dan memutuskan adalah....
    a. MA
    b. KY
    c. MK
    d. Panwaslu
20. Calon Hakim Agung diusulkan oleh KY kepada....
    a. MA
    b. MK
    c. Menteri Kehakiman
    d. DPR
21. Lembaga negara yang berhak menguji secara material peraturan di bawah UU adalah....
    a. DPR
    b. KPU
    c. BPK
    d. MA

22. Kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009 bernama....
    a. Gotong royong
    b. Pembangunan
    c. Indonesia Bersatu
    d. Reformasi
23. DPR memiliki kekuasaan membentuk UU, maka disebut lembaga.....
    a. eksekutif
    b. legislatif
    c. yudikatif
    d. federatif
24. Anggota MPR terdiri dari....
    a. seluruh anggota DPR dan DPD
    b. seluruh anggota DPR dan BPK
    c. seluruh anggota DPR dan DPRD
    d. seluruh anggota DPR dan utusan daerah
25. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK dilaporkan kepada....
    a. DPR
    b. presiden
    c. DPD
    d. MA

B. Menjawab pertanyaan!

1. Berikan contoh pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan, sehari- hari!
2. Sebutkan rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta!
3. Di manakah rumusan Pancasila yang sah dimuat?
4. Jelaskan tugas BPUPKI!
5. Mengapa kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan pribadi?
6. Sebutkan kewenangan MPR!
7. Jelaskan tugas komisi yudisial!
8. Apa saja wewenang mahkamah konstitusi?
9. Sebutkan asas pemilihan umum!
10. Apakah lembaga yang menyelenggarakan Pilkada?



Bab III

PERAN INDONESIA DI ASIA TENGGARA



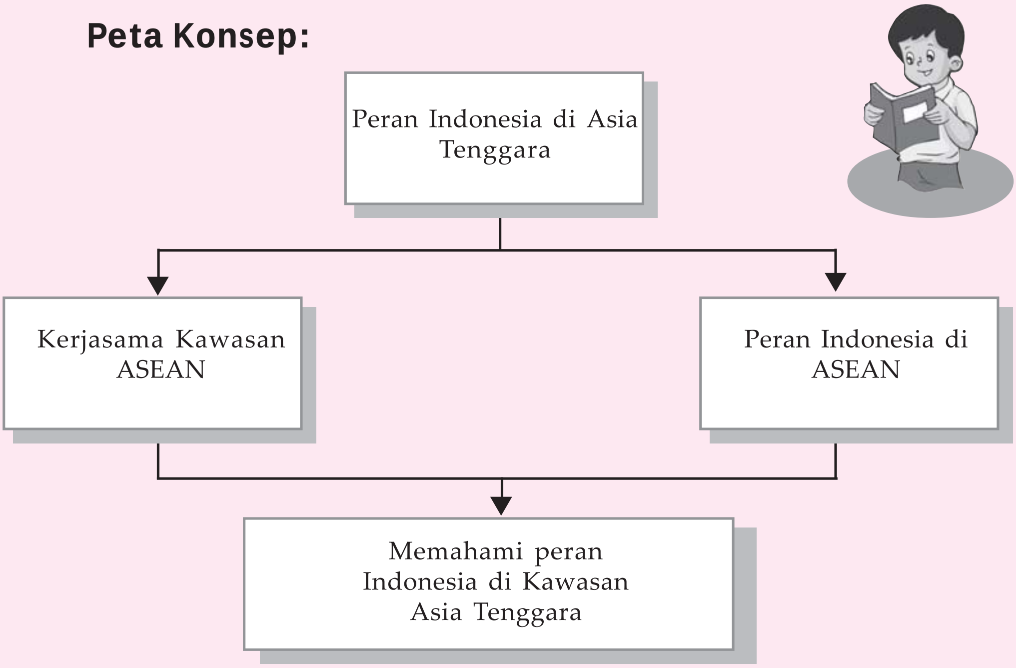
www.map.co.id



Tujuan Pembelajaran:

Kamu akan mempelajari peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara. Bab ini berisi uraian tentang kerja sama negara-negara Asia Tenggara dan peran Indonesia di Asia Tenggara.

Peta Konsep:





Kata Kunci:

Asia Tenggara, ASEAN, kerja sama



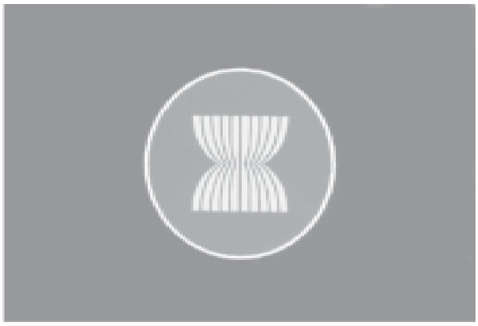
Renungan

Pernahkah kamu mengamati kehidupan bertetangga di kampungmu? Orang yang paling baik dalam bertetangga adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada tetangganya, bukan yang merugikan. Demikian halnya dalam kehidupan bertetangga antar negara. Negara yang baik adalah negara yang memberikan manfaat kepada negara tetangganya.

Negara Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara terletak pada posisi yang strategis, karena merupakan jalur lalu lintas internasional yang sangat ramai. Terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta jalur lalu lintas antara Benua Asia dan Benua Australia.

Indonesia merupakan salah satu negara penting di kawasan Asia Tenggara. Banyak kiprah yang telah ditunjukkan oleh negara kita. Peran penting dalam hubungan di dalam kawasan juga telah dilakoni. Tahukah kamu bagaimana peran Indonesia di Asia Tenggara?

A. Kerja sama Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara



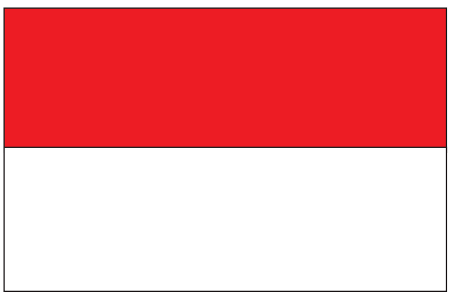
Gambar 3.1 Lambang ASEAN

Salah satu bagian wilayah Benua Asia adalah Asia Tenggara. Secara geografis kawasan Asia Tenggara terletak di antara 29 derajat Lintang Utara sampai dengan 11 derajat Lintang Selatan. Serta di antara 93 derajat Bujur Timur sampai dengan 141 Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Wilayah Asia Tenggara terletak pada posisi yang strategis. Wilayah tersebut merupakan jalur lalu lintas internasional yang sangat ramai. Letaknya diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta jalur lalu lintas antara Benua Asia dan Benua Australia.

1. Profil Singkat Beberapa Negara di Kawasan Asia Tenggara

a. Indonesia

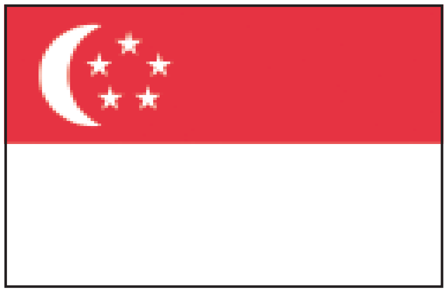


Gambar 3.2 Bendera Republik Indonesia

Republik Indonesia ibu kotanya Jakarta. Bentuk negara kesatuan, dipimpin oleh seorang presiden. Presiden RI bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Republik Indonesia merupakan negara paling luas wilayahnya di Asia Tenggara yaitu lebih dari 5 juta Km2. Jumlah penduduknya juga paling banyak, yaitu lebih dari 200 juta jiwa. Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke, jumlah pulaunya lebih dari 17.000 buah. Pernah dijajah oleh Belanda dan bangsa lain selama 350 tahun. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945.

b. Singapura

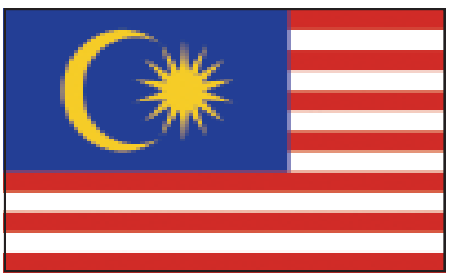


Gambar 3.3 Bendera Singapura

Republik Singapura ibu kotanya Singapura. Bentuk negara kesatuan, kepala negara dipegang oleh presiden, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Sebelum berdiri sendiri sebagai negara, Singapura merupakan bagian dari Malaysia dan merupakan bekas jajahan Inggris. Sejak 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri menjadi negara baru. Luas wilayahnya hanya 684 km2, dan hanya meliputi satu pulau. Walaupun kecil, Singapura merupakan negara modern yang sangat maju di Asia Tenggara. Hampir seluruh pendapatan nasionalnya diperoleh dari sektor industri, perdagangan dan jasa.

c. Malaysia



Gambar 3.4 Bendera Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi, beribukota di Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan, kepala negara dipegang ultan yang bergelar Yang Dipertuan Agung.

Kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Malaysia dulu bekas jajahan Inggris, memperoleh kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957.

Malaysia memiliki wilayah bagian barat yakni Semenanjung Malaka yang meliputi 11 negara bagian. Malaysia bagian timur yang terletak di Kalimantan Utara terdiri dari dua negara bagian.

d. Filipina

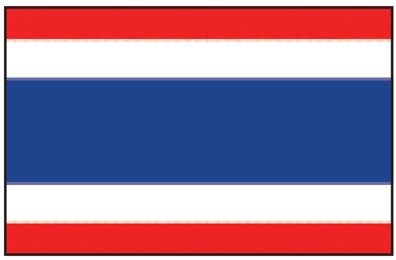


Gambar 3.5 Bendera Filipina

Negara ini beribukota di Manila. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Presiden Filipina memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Filipina pernah sangat lama dijajah oleh Spanyol.

Filipina juga termasuk negara kepulauan dengan pulau terbesar adalah pulau Mindanau dan Luzon.

e. Thailand



Gambar 3.6 Bendera Thailand

Thailand beribukota di Bangkok. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negara dipegang oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum pernah dijajah oleh negara lain.

Thailand merupakan penghasil beras terbesar. Oleh karena itu, sering mendapat sebutan lumbung padi di Asia. Negeri ini juga sering dijuluki Negeri Gajah Putih, negeri Seribu Pagoda.

f. Brunai Darussalam



Gambar 3.7 Bendera Brunai Darussalam

Negara ini terletak di pulau Kalimantan sebelah utara. Luas wilayahnya lebih kurang 5 ribu km2. Ibukotanya Bandar Sri Begawan. Brunai Darussalam adalah sebuah negara kasultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Sebelum merdeka merupakan koloni Inggris. Negara ini menjadi kaya raya karena merupakan penghasil minyak dan gas alam.

g. Vietnam

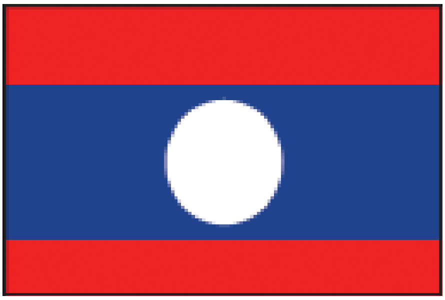


Gambar 3.8 Bendera Vietnam

Negara ini dulu bekas jajahan Perancis. Setelah merdeka pecah menjadi dua yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Perpecahan itu disebabkan oleh perbedaan ideologi, sehingga terjadi perang saudara. Baru tahun 1975 kedua negara tersebut dapat bersatu lagi dan ibukotanya di Saigon. Luas wilayah negara ini lebih kurang 300 ribu km2.

Vietnam merupakan negara yang perkembangannya terlambat diantara negara-negara ASEAN. Hal ini diakibatkan dengan adanya perang saudara dinegara tersebut. Akan tetapi setelah ada perdamaian negara ini mulai bangkit.

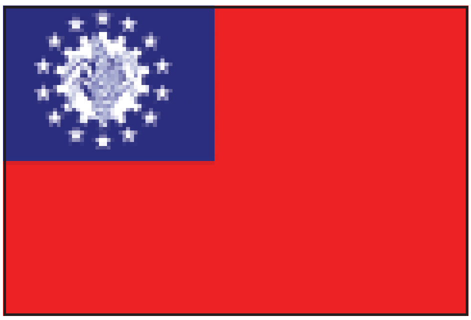
h. **Laos**



Gambar 3.9 Bendera Laos

Negara ini bekas jajahan Perancis yang terletak di kawasan Indo Cina. Terletak di antara sungai Mekong dan pegunungan Annam. Sebagain besar wilayahnya masih merupakan hutan rimba dan bergunung-gunung. Luas wilayahnya lebih kurang 230 ribu km2, ibukotanya Vientiane. Laos termasuk negara yang tertinggal di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

i. **Myanmar**



Gambar 3.10 Bendera Myanmar

Negara ini dulu bernama Burma. Beribukota di Yangoon. Luas wilayahnya lebih kurang 678 ribu km2. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Pemerintahannya sering dikuasai oleh tentara seperti yang terjadi saat ini, sehingga demokrasi kurang berkembang di negara ini. Ada tokoh pejuang demokrasi yang sangat gigih dan terkenal di negara ini, dia adalah seorang perempuan bernama Aung San Suu Kyi. Saat ini beliau masih dipenjara oleh rezim militer Myanmar. Demokratisasi dinegara ini memang sudah mengalami kemunduran. Adanya pola kepemimpinan diktator menyebabkan negara ini mengalami kemunduran. Di era sekarang negara ini sudah mulai membuka diri pada dunia internasional.



Jago Berpikir

Gerakan demokrasi di Myanmar tidak bisa dilepaskan dari sosok Aung San Suu Kyi. Dia adalah sosok fenomenal di Myanmar. Kegigihannya memperjuangkan demokrasi memaksanya untuk keluar masuk penjara.

Nah, tugas kamu surat kabar atau koran mengenai gerakan demokrasi di Myanmar dan sosok Suu Kyi. Jadikanlah berita koran yang kamu dapatkan sebagai bahan untuk membuat tulisan pendek mengenai Aung San Suu Kyi dan perjuangannya.

Setorkanlah hasil tulisanmu kepada guru untuk dinilai.

j. Kamboja



Gambar 3.11 Bendera Kamboja

Wilayahnya terletak di bagian selatan Semenanjung Indo Cina, merupakan bekas jajahan Perancis. Luas wilayahnya lebih kurang 180 ribu km2. Kamboja beribukota di Phnom Penh. Bentuk negaranya adalah kerajaan. Kepala negara dipegang oleh raja dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Di negara ini terdapat peninggalan kebudayaan kuno berupa candi, yaitu candi Angkor Vat dan Angkor Tom. Sungai Mekong merupakan urat nadi bagi kehidupan penduduk setempat.

Negara Kamboja mulai berkembang setelah selesai perang saudara di negara tersebut. Ketika terjadi perang keadaan negara ini sangat memprehatinkan, banyak penduduk yang meninggal sia-sia dan terjadi gelombang pengungsian yang besar. Akibatnya negara ini tergolong negara yang tidak dapat berkembang.

2. Indonesia Berada di Kawasan Asia Tenggara



www.indonesia_map_large.com

Gambar 3.12 Peta Wilayah Indonesia

Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan ini terdapat negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Perhatikan peta negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dapatkah kamu menemukan negara-negara tersebut?

Sebagaimana hidup bertetangga, hubungan dengan negara-negara tetangga harus terjalin dengan baik. Kita harus saling menghormati dan bekerj asama menjaga keamanan kawasan. Jika negara tetangga membutuhkan bantuan, kita harus memberikan bantuan sesuai kemampuan kita. Semua ini penting dalam rangka menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan ekonomi kawasan.

Pada tanggal 8 Agustus 1967, lima negara di Asia Tenggara mendeklarasikan pendirian Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok. Lima negara ini adalah Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia. Pendirian ASEAN adalah untuk mengukuhkan kerja sama antarnegara di kawasan ini. Mereka sadar bahwa kerjasama antarnegara dalam suatu kawasan itu penting.

Jumlah anggota ASEAN kini bertambah menjadi 10 negara terdiri dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Jadi hampir semua negara-negara di Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN kecuali Timor Leste dan Papua New Guinea.

3. Mengapa Ada Kerja sama Antarnegara Asia Tenggara?

Hubungan suatu negara dengan negara lain tidak lepas dari kepentingan nasional negara masing-masing. Semua negara tentu ingin menjadi maju dan sejahtera. Namun untuk menjadi maju dan sejahtera, suatu negara membutuhkan negara lain karena beberapa alasan berikut.

a. Perbedaan Kondisi Geografis

Meski sama-sama berada di Asia Tenggara, setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Indonesia memiliki wilayah yang amat luas. Sementara Singapura dan Brunai Darussalam memiliki wilayah yang sempit. Brunai memiliki kekayaan minyak bumi yang besar tetapi Singapura tidak. Jadi setiap negara harus bekerja sama dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan setiap negara membutuhkan barang dari negara lain.

b. Perbedaan dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong kerja sama di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, industri, dan bidang lainnya yang membutuhkan keahlian dan mesin-mesin modern. Sebagai contoh, Singapura terkenal maju dalam bidang pendidikan. Pelajar Indonesia dengan demikian dapat belajar ke Singapura daripada jauh-jauh belajar ke Amerika serikat. Namun sebaliknya, karena Indonesia memiliki daerah pertanian dan lautan yang luas, negara lain dapat belajar mengenai teknik pertanian dari Indonesia.

c. Politik dan Keamanan

Kerja sama seringkali dilakukan karena kesamaan paham politik. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengakrabkan hubungan kedua negara. Dapat juga digunakan untuk melindungi kepentingan politik negara-negara penganut paham yang sama terhadap paham politik lainnya.

Kesadaran akan saling tolongmenolong, berada dalam kawasan yang sama, dan menjaga keamanan bersama juga dapat menumbuhkan kerja sama. Hubungan kerja sama antarnegara dalam suatu kawasan dapat dilakukan antara lain melalui latihan militer bersama atau patroli bersama di laut.

d. Kesamaan dalam Berbagai Hal

Terkadang bukan perbedaan yang membuat kita bekerja sama dengan negara tetangga. Persamaan posisi, kebudayaan, asal-usul, dapat mendorong terjalinnya kerja sama. Meskipun terdapat beragam alasan untuk bekerja sama dengan negara lain, kerja sama itu haruslah membawa manfaat. Beragam manfaat bisa kita petik dari kerjasama dengan negara lain. Manfaat itu antara lain kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Selain itu, kita dapat bertukar pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Melalui pertukaran itu, kualitas sumber daya manusia kita dapat meningkat.

4. Kerja sama ASEAN



www.aseansec.org

Gambar 3.13 Penandatanganan Deklarasi Bangkok

a. Pembentukan ASEAN

Perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur juga mempengaruhi kawasan Asian Tenggara. Pembentukan blok-blok atau organisasi kerja sama antarnegara dalam kawasan ini terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan mempertegas hal ini. Pada tanggal 8 September 1958, Australia, Perancis, Inggris, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, dan Amerika Serikat mendirikan Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO). SEATO dibentuk untuk menjalin kerja sama dalam bidang pertahanan dan bertujuan untuk membendung pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 1961, dengan dukungan dari Thailand dan Filipina, Malaysia membentuk Perhimpunan Asia tenggara (ASA). ASA bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Tuanku Abdul Rahman, pemimpin Malaysia pada saat itu, menginginkan negara lain dalam kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk bergabung. Namun Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno menolak untuk bergabung. Indonesia bahkan mencurigai bahwa organisasi tersebut merupakan perpanjangan tangan atau melayani kepentingan negara-negara Barat.

ASA tidak berjalan mulus karena terjadi perseteruan di antara mereka. Pada tahun 1962, Filipina mengklaim bahwa Sabah (negara bagian Malaysia) merupakan bagian dari Filipina. Pada tahun 1963, organisasi lain dikenal sebagai Maphilindo dibentuk. Maphilindo terdiri dari Malaysia, Filipina dan Indonesia. Namun, organisasi ini tidak bertahan lama setelah Indonesia menghidupkan konfrontasi dengan Malaysia.

Pada bulan Maret tahun 1966, muncul ide untuk menghidupkan kembali ASA. Namun, Indonesia tetap menolak untuk bergabung. Setelah pemerintah Indonesia dipegang oleh Presiden Soeharto, Indonesia kembali menjalin hubungan dengan Malaysia dan singapura. Hubungan Indonesia juga meluas dengan negara-negara lain di kawasan Asia tenggara.

Pada tanggal 8 agustus 1967, lima menteri luar negeri dari Indonesia, Thailand, singapura, Filipina, dan Malaysia bertemu di Bangkok. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan berupa pendirian Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh kelima delegasi dari masing-masing negara. Kelima orang tersebut antara lain:

1. Adam Malik, menteri luar negeri Indonesia;
2. Tuanku Abdul Razak, menteri luar negeri Malaysia;
3. Thanat Khoman, menteri luar negeri Thailand;
4. Narcisco Ramos, menteri luar negeri Filipina;
5. Rajaratnam, menteri luar negeri Singapura.

b. Deklarasi Bangkok

1) mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan asia Tenggara;
2) meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;
3) meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
4) memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada.
5) meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

c. Sifat Keanggotaan ASEAN

Sifat keanggotaan ASEAN adalah terbuka bagi semua negara di kawasan Asia Tenggara. Keikutsertaan suatu negara ditandai dengan kesepakatan terhadap asas-asas dan tujuan ASEAN. Seajak tanggal 7 Januari 1984, atas persetujuan kelima anggota ASEAN, Brunai Darussalam masuk sebagai anggota baru yang keenam dalam ASEAN.

Pada tanggal 28 Juli 1995, Vietnam resmi disetujui sebagai anggota ASEAN yang ketujuh. Laos dan Myanmar masuk sebagai anggota ASEAN yang kedelapan dan kesembilan pada tanggal 23 juli 1997. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1998, Kamboja masuk menjadi anggota ASEAN yang kesepuluh.



Gambar 3.14 Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta

5. Sekretariat ASEAN

Sejak kegiatan ASEAN semakin banyak maka dibentuklah sebuah sekretariat ASEAN. Pada tahun 1976, dibangun gedung Sekretariat ASEAN sebagai upaya untuk memudahkan koordinasi badan-badan ASEAN. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal diangkat oleh sidang menteri ASEAN, secara bergilir menurut abjad. Lama masa jabatan dua tahun. Pejabat ini bertanggung jawab pada sidang Menteri ASEAN manakala bersidang. Beberapa orang yang pernah menduduki jabatan Sekretaris Jenderal ASEAN adalah sebagai berikut:

a. HR Dharsono dari Indonesia menjabat tahun 1977-1978;
b. Umarjadi Notowijono dari Indonesia menjabat tahun 1978-1979;
c. Datuk Ali bin Abdullah dari Malaysia menjabat tahun 1979-1981;
d. Narcisco Reyes dari Filipina menjabat tahun 1981-1983;
e. Chan Kai Yau dari Singapura menjabat tahun 1983-1985;
f. Phan Wamamethe dari Thailand menjabat tahun 1985-1986;
g. Roderick Yong dari Brunai Darussalam menjabat tahun 1986-1989;
h. Rusli Noor dari Indonesia menjabat tahun 1989-1992;
i. Datuk Ajit Singh dari Malaysia menjabat tahun 1992-1998;
j. Rodolfo C. Severini Jr. dari Filipina menjabat tahun 1998-2002;
k. Ong Keng Yong dari Singapura menjabat sejak tahun 2002.



www.asean.gov

Gambar 3.15 KTT ASEAN diikuti para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan ASEAN

6. Struktur Organisasi ASEAN

Struktur organisasi ASEAN setelah KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976 adalah sebagai berikut:

a. Pertemuan para kepala pemerintahan

Pertemuan ini biasa disebut dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Pertemuan ini merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi ASEAN.



www.state.gov

Gambar 3.16 Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN

b. Sidang tahunan para menteri luar negeri

Sidang ini dilaksanakan secara bergiliran yang disebut Pertemuan Menteri ASEAN. Sidang ini untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi ASEAN.

c. Sidang para menteri ekonomi.

Sidang ini dilakukan setahun dua kali untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kerja sama di bidang ekonomi.



Gambar 3.17 *Sidang Menteri Ekonomi ASEAN*

d. Sidang para menteri nonekonomi.

Sidang ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang menyangkut bidang penerangan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

7. Bentuk Kerja sama ASEAN

Kerjasama negara-negara ASEAN dilakukan di berbagai bidang, antara lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Kerja sama ini harus menghormati prinsip-prinsip dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Isi dari perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara;
2. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain;
3. Penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai;
4. Menghindari penggunaan atau ancaman melalui kekuatan militer;
5. Kerja sama yang efektif antarnegara anggota.

8. Kerja sama Bidang Politik dan Keamanan

Hubungan kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang politik dan keamanan diarahkan untuk menciptakan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional di masing-masing negara anggota. Itulah mengapa segala bentuk konflik atau sengketa yang terjadi di antara negara anggota ASEAN harus diselesaikan dengan cara-cara damai.

Berbagai usaha untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara ditempuh melalui penandatanganan berbagai dokumen atau kesepakatan, antara lain:

a. Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas dan netral atau *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (*ZOPFAN*) atau dikenal dengan Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Perjanjian ini berisikan keinginan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral.
b. Perjanjian persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in South-east Asia*) pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali.
c. Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir pada tanggal 15 Desember 1997 di Bangkok.Perjanjian ini melarang masing-masing negara anggota ASEAN untuk mengembangkan, memproduksi, atau memiliki senjata nuklir. Bahkan juga melarang menjadi tempat persinggahan senjata nuklir, dan melakukan uji coba nuklir.
d. Komunitas keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. Pembentukan komunitas keamanan ASEAN datang atas prakarsa Indonesia. Melalui komunitas keamanan ASEAN akan didirikan sebuah pusat untuk memerangi terorisme, pelatihan pasukan penjaga perdamaian, dan pertemuan secara teratur antara polisi dan menteri pertahanan ASEAN.



www.asean.gov

Gambar 3.18 Pertemuan ASEAN di Kuala Lumpur Menghasilkan Visi ASEAN 2020

ASEAN menginginkann kerja sama dalam bidang politik dan keamanan lebih luas lagi. Pada tahun 1991, ASEAN membentuk *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Forum ini mengikutkan negara-negara lain di luar kawasan Asia Tenggara, antara lain Australis, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, dan Kanada.

9. Kerja Sama Ekonomi

Pada awal pembentukannya perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN masih sangat kecil. Oleh karena itu kerja sama ekonomi diarahkan untuk meningkatkan volume perdagangan dan pertukaran jasa antar anggota. Bentuk kerja sama ini antara lain berupa penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN.

KTT ASEAN IV di Singapura pada tahun 1992 meluncurkan gagasan untuk menerapkan kawasan perdagangan bebas yang dikenal dengan AFTA *(ASEAN Free Trade Area).* Tujuan pembentukan kawasan ini adalah untuk meningkatkan daya saing kawasan agar mampu bersaing dengan negara atau kawasan lainnya. Usaha ini dicapai melalui penghapusan tarif ataupun hambatan-hambatan lainnya dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas dan daya saing.

Kerja sama ekonomi juga dilakukan melalui pembentukan kawasan pertumbuhan. Pembentukan kawasan pertumbuhan ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, pariwisata, perkebunan, dan perikanan pada suatu kawasan. Pembentukan kawasan pertumbuhan antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN antara lain adalah *BIMP-EAGA (Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipines-East ASEAN Growt Area) dan IMT-GT (Indonesia, Malaysia, and Thailand-Growth Triangle).*

Gagasan pembentukan BIMP-EAGA datang dari Presiden Fidel Ramos (Filipina) dan diresmikan tahun 1994. Kawasan pertumbuhan BIMP-EAGA mencakup:

1. Brunai Darussalam;
2. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Indonesia);
3. Sabah, Sarawak, dan Labuhan (Malaysia);
4. Mindanao dan Palawan (Filipina).

Sedangkan IMT-GT didirikan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kerja sama ini diresmikan pada pertemuan pertama Tingkat Menteri IMT-GT di Langkawi, Malaysia, pada tanggal 20 Juli 1993. Kawasan IMT-GT mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Sumatera Utara dan Aceh (Indonesia);
2. Kedah, Perlis, Penang, dan Perak (Malaysia);
3. Satun, Narathiwat, Yala, Songkhla, dan Pattani (Thailand).

Pada tahun 1997, kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota ASEAN menginginkan integrasi ekonomi kawasan lebih jauh lagi. Integrasi dilakukakn untuk mengurangi hambatan fisik dalam aliran barang, jasa, dan investasi, dari suatu negara ke negara lain masih dalam satu kawasan. Langkah ini dilakukan antara lain melalui pengembangan jaringan transportasi ASEAN.

Sebaiknya Kamu Tahu



AFTA Kerja sama Ekonomi ASEAN

AFTA telah disepakati mulai berjalan sejak tahun 2003. Dengan AFTA ini, negara-negara anggota ASEAN akan mempraktekkan perdagangan (pasar bebas) antar sesama anggota. Artinya, produk salah satu negara anggota ASEAN bisa dijual di negara anggota lainnya, tanpa bea masuk sebagaimana yang selama ini terjadi. Tanpa bea masuk ini berarti merupakan penghematan luar biasa terhadap biaya dari produk luar negeri tersebut. Ini akan berbeda dengan praktek selama ini yaitu biaya sangat banyak dikeluarkan untuk bea masuk.

Lebih-lebih untuk barang-barang tertentu, yang karena ada proteksi dari pemerintah, maka harus dengan bea masuk yang sangat tinggi. Dengan tanpa bea masuk ini berati bahwa produk luar negeri mampu menekan biaya sampai semurah-murahnya. Akibat dengan harga yang sangat murah, barang impor ini akan mudah bersaing dengan produk dalam negeri. Jika barang impor ini sama, apalagi lebih bagus, kualitasnya dibandingkan dengan produk dalam negeri, maka mau tidak mau konsumen kita akan memilih barang impor.

AFTA di satu sisi akan menguntungkan konsumen, karena dapat memperoleh barang bagus dengan harga yang murah. Jika dampak AFTA bagi konsumen sangat positif dan menguntungkan, akan tetapi bagi produsen tidak mustahil jika berdampak negatif. Bisa jadi produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri di negeri sendiri.

10. Kerja Sama Sosial Budaya

Kerja sama sosial budaya yang akhirnya berganti istilah menjadi kerja sama fungsional (Deklarasi Manila, 15 Desember 1987). Mencakup bidang penerangan, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, narkoba, pemuda, dan wanita.

Jago Berlatih

Cobalah berlatih menjawab pertanyaan di bawah ini.

1. Jelaskan secara singkat letak wilayah Asia Tenggara!
2. Sebutkan salah satu contoh kerja sama ASEAN di bidang ekonomi!
3. Mengapa Asia Tenggara merupakan jalur lalu lintas internasional yang sangat ramai?
4. Jelaskan salah satu alasan perlunya kerja sama antarnegara Asia Tenggara!
5. Kapan ASEAN secara resmi dibentuk?

Isilah titik-titik di bawah ini dengan isian yang sesuai!

1. Thailand seringkali disebut negeri ....
2. Delegasi Indonesia dalam Deklarasi Bangkok adalah ... sebagai Menlu RI.
3. Keanggotaan ASEAN bersifat ... bagi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara
4. ... merupakan anggota ASEAN yang kesepuluh.
5. Kekuasaan tertinggi ASEAN berada pada forum ... .

B. Peranan Indonesia dalam ASEAN



bali_9thSUMMITPhoto

Gambar 3.19 KTT ASEAN di Bali Indonesia

Berikut ini adalah beberapa peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara:

1. Indonesia adalah salah satu penggagas lahirnya kerjasama negara-negara ASEAN. Diwakili oleh menteri luar negeri Adam malik, menjelaskan visi Indonesia tentang Kawasan Asia Tenggara yang Mandiri.
2. Sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN I di Denpasar, Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976. Dalam KTT tersebut menghasilkan Deklarasi Kesepakatan ASEAN.

3. Mengirim pasukan perdamaiann PBB yang dikenal dengan Pasukan Garuda. Pengiriman Pasukan Garuda IV dan V untuk menyelesikan konflik perang saudara di Vietnam pada tahun 1973 dan 1974.

Sebaiknya Kamu Tahu



Kontingen Garuda (Konga) IV dikirim ke Vietnam pada 1973. Konga IV berada di bawah misi ICCS dan dipimpin oleh Brigjen TNI Wiyogo Atmodarminto. Pada tanggal 23 Januari 1973 pasukan Garuda IV diberangkatkan ke Vietnam yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Wiyogo Atmodarminto, yang merangkap Deputi Militer Misriga dengan kekuatan 294 orang yang terdiri dari anggota ABRI dan PNS Departemen Luar Negeri.

Kontingen Garuda IV ini merupakan Kontingen ICCS (International Commission of Cantre and Supervision) pertama yang tiba di Vietnam. Tugas kontingen Garuda IV adalah mencegah pelanggaran-pelanggaran, menjaga status quo, mengawasi evakuasi pasukan dan alat-alat perang serta mengawali pertukaran tawanan perang.

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_Garuda)

4. Indonesia merupakan penggagas Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas keamanan ASEAN meliputi kerja sama pertahanan, kejahatan lintas negara,terorisme, separatisme, dan sebagainya.
5. Perlindungan HAM. Indonesia ikut mendorong negara-negara ASEAN agar lebih demokratis dan menghargai HAM. Indonesia gigih mendorong Myanmar agar lebih demokratis dan menghargai HAM rakyatnya.
6. Memfasilitasi perdamaian pemerintah Filipina dengan Gerakan Pembebasan Moro. Atas permintaan dari pemerintah Filipina, Indonesia membantu usaha perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Muslim Moro. Beberapa pertemuan antara keduanya berlangsung pada tahun 1974. Pemerintah Indonesia menginginkan agar pemerintah Filipina dapat menjamin kebebasan beragama, terutama bagi umat muslim dan dapat hidup berdampingan secara damai di Filipina.

7. Mendamaikan Kamboja. Indonesia aktif berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja dengan mengusulkan sebuah pertemuan informal di Jakarta atau *Jakarta Informal Meeting* pada tahun 1988. Pertemuan ini kemudian membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1989. Pada tahun 1992, Indonesia kembali mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di Kamboja.
8. Ikut berperan aktif dalam menjalin hubungan ASEAN dan negara-negara maju khususnya di bidang ekonomi. Misalnya diselenggarakan KTT ASEAN Cina tahun 2006.

Indonesia bersama-sama dengan anggota ASEAN lainnya terus berusaha meningkatkan hubungan dan kerja sama disegala bidang dengan berdasarkan saling pengertian dan saling menguntungkan. Hal ini dilaksanakan dalam upaya bersama menciptakan stabilitas kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan sejahtera.



www.photobucket.com

Gambar 3.20 Pertandingan SEA Games, Olah Raga Tingkat ASEAN

Jago Bermain







Di antara dua gambar di atas terdapat lima perbedaan. Carilah perbedaan tersebut dalam waktu cepat. Bagilah kelas dalam beberapa kelompok. Guru akan menentukan waktu untuk permainan ini. Kelompok yang paling cepat menemukan seluruh perbedaan akan menjadi pemenang.

Jago Berlatih

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Siapa yang mewakili Indonesia untuk menjelaskan visi Indonesia tentang Kawasan Asia Tenggara yang Mandiri?
2. Apa salah satu peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Asia Tenggara?
3. Bagaimana sikap Indonesia atas demokrasi di Myanmar?
4. Dimana KTT I ASEAN dilaksanakan?
5. Apa salah satu keputusan penting dalam KTT I ASEAN tersebut?

Rangkuman

1. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar.
2. Secara geografis letak wilayah Asia Tenggara sangat strategis, karena menjadi jalur lalu lintas internasional.
3. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk organisasi regional yakni, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau *Association of South East Asian Nation (ASEAN).*
4. ASEAN bertujuan menjalin hubungan dan kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya diantara negara-negara Asia Tenggara.
5. Hubungan dan kerja sama ASEAN didasarkan asas saling menghormati, hak hidup bebas, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penyelesaian sengketa dengan cara damai, tidak melakukan ancaman terhadap negara lain, dan kerja sama yang efektif.
6. Untuk mewujudkan tujuan ASEAN , diadakan pertemuan-pertemuan antar negara ASEAN melalui KTT, Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri, Sidang Tahunan Menteri Ekonomi dan NonEkonomi.
7. ASEAN menginginkan menjadi kawasan yang damai, merdeka dan netral serta bebas dari senjata nuklir.
8. Dalam menghadapi globalisasi, khususnya bidang ekonomi, maka negara-negara AsiaTenggara membentuk AFTA yaitu perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara.

9. Peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara antara lain:
   a. Sebagai pemrakarsa terbentuknya ASEAN;
   b. Senyelenggara KTT ASEAN;
   c. Menjadi tempat kantor sekretariat ASEAN;
   d. Pernah menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN;
   e. Ikut menyelesaikan konflik Vietnam, Kamboja, dan Filipina.
10. Dalam menghadapi tantangan di masa mendatang, negara-negara ASEAN menyepakati "Visi ASEAN 2020" pada pertemuan ASEAN di Kuala Lumpur 1997.



Uji Kompetensi

Ayo mengukur kemampuanmu dalam memahami materi yang telah kamu pelajari. Kemampuanmu dapat kamu ukur dengan mengerjaan soal-soal berikut. Selanjutnya, mintalah saran kepada gurumu apakah kemampuanmu sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan.

A. Memilih a, b, c, atau d sebagai jawaban yang tepat

1. Secara geografis wilayah Asia Tenggara sebelah timur berbatasan dengan....
   a. samudera Hindia
   b. samudera Pasifik
   c. Papua Nugini
   d. Cina
2. Negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas dan penduduk paling banyak adalah....
   a. Malaysia
   b. Indonesia
   c. Filipina
   d. Thailand
3. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut, *kecuali*....
   a. perdamaian di kawasan Asia Tenggara
   b. pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara
   c. kerja sama bidang militer
   d. memelihara kerja sama di kawasan Asia Tenggara
4. Asia Tenggara amat strategis, karena....
   a. terletak di kawasan Asia Pasifik
   b. memiliki perairan yang luas
   c. kekayaan alamnya sangat melimpah
   d. terletak pada jalur lalu lintas dunia yang ramai
5. Negara Jiran (negara tetangga) Indonesia yang paling dekat adalah....
   a. Filipina
   b. Thailand
   c. Malaysia
   d. Myanmar
6. Kerja sama ASEAN dimulai ketika terjadi deklarasi....
   a. Bangkok
   b. Singapura
   c. Kuala Lumpur
   d. Jakarta

7. Pada awal berdirinya anggota ASEAN berjumlah....
   a. 5 negara
   b. 6 negara
   c. 7 negara
   d. 8 negara
8. Sekretariat ASEAN terdapat di negara....
   a. Malaysia
   b. Indonesia
   c. Filipina
   d. Singapura
9. Penyelesaian konflik antarnegara ASEAN sebaiknya dilakukan dengan cara....
   a. damai
   b. kekerasan
   c. hukuman
   d. pemboikotan
10. Gagasan tentang AFTA mulai diluncurkan pada KTT ASEAN IV di negara....
   a. Thailand
   b. Singapura
   c. Malaysia
   d. Filipina
11. Lingkaran yang ada pada logo ASEAN melambangkan....
   a. cita-cita pendiri
   b. keberanian dan kedinamisan
   c. kemakmuran
   d. persatuan
12. Tokoh deklarator ASEAN yang berasal dari Thailand adalah....
   a. Narcisco Ramos
   b. Rajaratnam
   c. Thanant Khoman
   d. Tun Abdul Razak
13. Salah satu asas ASEAN adalah....
   a. membantu pertumbuhan ekonomi nasional negara anggota
   b. membentuk kelompok kerja ekonomi di kawasan Asia
   c. ikut campur tangan terhadap persoalan dalam negeri negara anggota
   d. membantu negara-negara lain untuk menjajah negara yang lemah
14. Presiden RI yang menolak untuk bergabung dengan SEATO adalah....
   a. Ir Soekarno
   b. Soeharto
   c. B.J. Habibie
   d. Abdurrahman Wahid
15. Negara di Asia yang masuk menjadi anggota ASEAN ke-10 adalah....
   a. Vietnam
   b. Laos
   c. Myanmar
   d. Kamboja

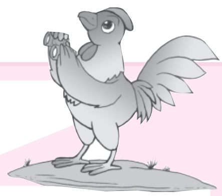
B. Mengisi titik-titik dengan jawaban yang benar

1. ASEAN dibentuk pada tanggal….
2. AFTA singkatan dari….
3. Pesta olah raga khusus negara-negara Asia Tenggara dinamakan….
4. Utusan Indonesia dalam pembentukan ASEAN adalah….
5. Kawasan ASEAN sangat strategis karena terletak di antara dua samudera yaitu….
6. Negara yang menjadi anggota ASEAN kesepuluh adalah….
7. Negara ASEAN yang wilayahnya paling luas adalah….
8. Negara ASEAN yang wilayahnya paling sempit adalah….
9. Negara ASEAN yang penduduknya paling banyak adalah….
10. Pada awal berdirinya, anggota ASEAN berjumlah….

C. Menjawab pertanyaan

1. Jelaskan asas ASEAN!
2. Apa tujuan ASEAN?
3. Sebutkan negarawan yang menandatangani berdirinya ASEAN!
4. Mengapa letak Asia Tenggara strategis?
5. Berilah tiga contoh peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara!

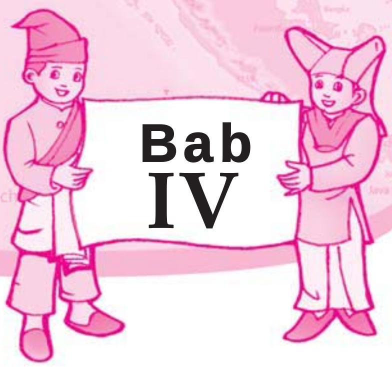
Aktivitasmu



Kerjakan secara berkelompok

Buatlah kelompok belajar, maksimal berjumlah 5 orang. Setiap kelompok membahas hubungan terkini Indonesia dengan satu negara tetangga.

1. Buatlah kelompok belajar, maksimal berjumlah 5 orang.
2. Setiap kelompok membahas hubungan terkini Indonesia dengan satu negara tetangga.
3. Guru akan mengundi negara-negara tetangga Indonesia untuk setiap kelompok.
4. Bagilah tugas kepada masing-masing anggota kelompok untuk membaca buku atau koran mengenai keadaan hubungan Indonesia saat ini dengan negara Asia Tenggara lainnya.
5. Diskusikanlah hasil belajar masing-masing anggota kelompok. Kemudian tuliskanlah poin-poin hasil diskusi dalam selembar kertas. Setorkanlah hasilnya kepada guru.
   Selamat beraktivitas!



Bab IV

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA



www.stweb.ait.ac



Tujuan Pembelajaran:

Kamu akan mempelajari peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi. Bab ini berisi uraian tentang politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional.

Peta Konsep:



Politik Luar Negeri Indonesia

- Politik Bebas Aktif
- Peranan Indonesia dalam percaturan internasional

Memahami peran politik luar negeri



Kata Kunci:

Politik luar negeri, bebas aktif, globalisasi, hubungan internasional, kepentingan nasional



Renungan:

Bangsa Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Prinsip ini diabdikan untuk kepentingan nasional. Apakah kamu telah memahami pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam percaturan internasional?

Era sekarang ini disebut sebagai era globalisasi karena dunia ini seolah-olah merupakan satu kesatuan. Di belahan dunia yang satu seseorang, dapat dengan mudah berkomunikasi dengan seseorang yang tengah berada di belahan dunia yang lain. Kamu bisa menyaksikan Olimpiade Atlanta di kota Atlanta Amerika Serikat lewat siaran langsung TV. Kamu dapat melihat persis seperti yang bisa disaksikan oleh orang-orang di tempat kejadian. Lewat internet, kamu bisa menemukan berbagai ragam informasi dari belahan dunia manapun. Oleh karena itu, kerja samaantar bangsa, serta politik luar negeri suatu negara menjadi sangat penting.



Gambar 4.1 Kantor Kedutaan Negara Sahabat di Jakarta



A. Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif

1. Setiap Negara Membutuhkan Negara Lain

Tahukah kamu mengapa suatu negara membutuhkan kerja sama dengan negara lain? Sebab tidak ada satu negara pun di jaman modern ini yang dapat mencukupi segala macam kebutuhannya sendiri. Negara-negara modern pasti membutuhkan negara lain. Karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, negara-negara modern melakukan kerja sama dengan negara lain.

Dalam melakukan kerja sama dengan negara lain inilah diperlukan politik luar negeri. Dengan tujuan agar dapat saling menguntungkan. Berikut ini adalah beberapa alasan perlunya kerja sama antarnegara:

1. setiap bangsa tidak hidup sendiri, tetapi bertetangga dengan bangsa-bangsa lain;
2. setiap bangsa ada saling ketergantungan dengan bangsa lain;
3. di era globalisasi ini negara yang tidak menjalin hubungan dengan negara lain akan tertinggal;
4. setiap negara memiliki sumber-sumber kekayaan yang berbeda dengan negara lain;
5. untuk memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing negara;
6. untuk menciptakan saling pengertian antar bangsa.

Jika di atas telah diuraikan alasan kerja sama, apa sesungguhnya tujuan kerja sama antar negara itu? Berikut ini adalah yang menjadi tujuan kerja sama antarnegara:

1. memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing negara;
2. menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya;

3. menciptakan saling pengertian antar bangsa/negara;
4. mempererat hubungan persahabatan antar bangsa;
5. membina dan menegakkan perdamaian dunia.

Kerja sama antarnegara dapat terjadi antara dua negara saja, juga dapat terjadi antar lebih dari dua negara. Kerja sama yang diadakan hanya oleh dua negara ini dapat dikatakan sebagai kerja sama bilateral. Kerjasama tersebut melibatkan lebih dalam dua negara adalah kerja sama multilateral.



www.ranesi.com

Gambar 4.2 Kantor Kedutaan RI Di Negara Sahabat

2. Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan untuk mengatur hubungan dengan negara lain yang berpijak kepada kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain.

Jadi, politik luar negeri Indonesia tidak lain adalah bagian dari politik nasional yang. hal tersebut merupakan penjabaran dari cita-cita nasional dan tujuan nasional negara Indonesia.

3. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia berpijak pada landasan-landasan sebagai berikut:

a. Landasan ideologis

Landasan ideologis adalah Pancasila, bahwa bangsa Indonesia mengakui semua manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia yang mempunyai martabat yang sama, tanpa memandang asal-usul keturunan, menolak penindasan manusia atas manusia atau penghisapan oleh bangsa lain, menempatkan persatuan dan

kesatuan, menunjukkan bangsa Indonesia yang memiliki sifat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan menunjukkan pandangan yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial dengan mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan.

b. Landasan Konstitusional

1) Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan.
2) Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan bahwa: "....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...."
3) Pasal-pasal UUD 1945:
    a) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1));
    b) Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat (1));
    c) Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat (2));
    d) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat (3)).
4) Landasan Operasional
    a) Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
    b) Kebijakan presiden dalam bentuk keputusan presiden;
    c) Kebijakan menteri luar negeri yang membentuk peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.



www.presidensby.com

Gambar 4.3 Presiden Menerima Duta Besar Negara Sahabat

4. Asas Politik Luar Negeri Indonesia

Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Aktif artinya tidak pasif atas kejadian-kejadian internasional melainkan aktif menjalankan kebijakan luar negeri. Aktif dalam arti ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

5. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan politik luar negeri Indonesia, yaitu:

a. mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan;
b. memperjuangkan perdamaian yang abadi;
c. memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan.

Sejak bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan belenggu penjajahan dari Belanda, cita-cita Bangsa Indonesia tidak terlepas kepada pencapaian kemerdekaan. Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional dengan tegas menyatakan: Indonesia merdeka dan berdaulat hanyalah merupakan sarana, suatu alat untuk mencapai susunan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh Rakyat Indonesia. Untuk mengejar serta melaksanakan cita-cita nasional itu perlu adanya kerja sama dan hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia. Hal-hal inilah yang merupakan titik tolak politik luar negeri Indonesia.



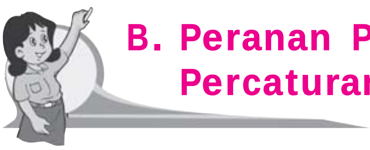
Jago Berlatih

Berlatihlah menjawab pertanyaan berikut ini.

1. Mengapa negara-negara di dunia melakukan kerja sama antarnegara?
2. Jelaskan landasan ideologis politik luar negeri Indonesia!
3. Apa tujuan politik luar negeri Indonesia?
4. Sebutkan salah satu landasan operasional politik luar negeri Indonesia!
5. Apa yang kamu ketahui tentang politik luar negeri suatu negara?

Isilah pernyataan berikut ini dengan pilihan isian yang sesuai sebagaimana yang tersedia pada kolom paling kanan!

No	Pernyataan	Isian
1	Negara-negara ... pasti melakukan kerjasama dengan negara lain	bebas aktif
2	UUD 1945 merupakan landasan .... politik luar negeri Indonesia	modern
3	Salah satu ... politik luar negeri Indonesia adalah mewujudkan perdamaian abadi	cita-cita
4	Bebas aktif adalah ... politik luar negeri Indonesia	
5	Politik luar negeri Indonesia untuk mewujudkan salah satu ..... nasional	konstitusional



B. Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional

Kebebasan Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri dibuktikan oleh peningkatan hubungan regional dan internasional sebagai berikut:



www.id.wikipedia.com

Gambar 4.4 Gedung Markas PBB di New York Amerika Serikat

1. Indonesia Masuk PBB

Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia resmi diterima sebagai anggota PBB, dan tercatat sebagai anggota yang ke-60. Banyak manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia semenjak menjadi anggota PBB. Berbagai bantuan dan jasa baik PBB telah dinikmati bangsa Indonesia:

a. PBB turut berperan menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda dalam perang Kemerdekaan (1945-1950) dengan mengirimkan KTN dan UNCI;

b. PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI dengan mengirim misi UNTEA;

c. PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui IMF, IBRD, UNESCO, WHO dan sebagainya.


www.asianafrican_museum.com

Gambar 4.5 Konferensi Asia Afrika Bandung 1955

2. Konferensi Kolombo

Dilaksanakan di Kolombo, Srilanka pada 28 April-2 Mei 1954. Dalam konferensi ini, Indonesia melontarkan perlunya diadakan KAA. Usul Indonesia itu diterima serta mendapat dukungan dari peserta Konferensi Kolombo tersebut. Hasil konferensi merekomendasikan:

1. Indocina harus dimerdekakan dari penjajahan Perancis;
2. menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko;
3. menyetujui diadakannya KAA.

3. Konferensi Pancanegara (Bogor)

Untuk merealisasikan tugas yang dibebankan kepada Indonesia, maka dilakukanlah pendekatan diplomatik kepada 18 negara di Asia dan Afrika. Hasilnya semua negara mendukung diadakannya KAA dan Indonesia sebagai tuan rumahnya.

Akhirnya pada tanggal 28-29 Desember 1954, peserta Konferensi Kolombo diundang untuk hadir di Konferensi Bogor. Tokoh penting yang hadir adalah:

1. Mr. Ali Sastroamidjojo (Indonesia);
2. Pandit Jawaharlal Nehru (India);
3. Mohammad Ali (Pakistan);
4. U Nu (Birma);
5. Sir John Kotelawala (Srilanka).

4. Konferensi Asia Afrika (KAA)

Diselenggarakan tanggal 18-24 April 1955. Dari 30 negara yang diundang, 29 negara hadir, terdiri dari 23 negara Asia dan 6 negara Afrika. Satu negara tidak hadir yaitu Federasi Afrika Tengah (Rhodesia dan Nyasa) yang tengah dilanda pergolakan politik.

a. Tujuan Konferensi Asia Afrika (KAA)
   1) mewujudkan kerja sama antar bangsa Asia dan Afrika;
   2) meningkatkan kerja sama sosial, ekonomi, kebudayaan Asia Afrika;
   3) membicarakan permasalahan kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme;
   4) meningkatkan peran negara Asia Afrika dalam menujudkan perdamaian dunia.

b. Kesepakatan KAA (Dasa sila Bandung)
   1) menghornmati HAM seperti yang termuat dalam Piagam PBB;
   2) menghormati kedaulatan, integritas territorial semua mbangsa;
   3) mengakui persamaan semua ras dan bangsa;
   4) tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain;
   5) menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahakan diri;
   6) tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;
   7) tidak melakukan agresi terhadap wilayah negara lain;
   8) menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai;
   9) meningkatkan kerjasama negara-negara Asia-Afrika;
   10) menghormati hukum internasional.


imageshack.com

Gambar 4.6 Pidato Bung Karno pada KAA di Bandung

c. Manfaat KAA Bagi Indonesia
   1) Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara Asia-Afrika.
   2) Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia mulai diikuti negara-negara yang tidak masuk Blok Barat dan Blok Timur.

d. Manfaat KAA Bagi Negara Asia Afrika
   1) Perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk memperoleh kemerdekaan semakin meningkat;
   2) Kedudukan bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam percaturan politik dunia mulai diperhitungkan;
   3) Meningkatnya kerja sama antar negara Asia-Afrika, dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya;

e. Manfaat KAA bagi Dunia
   1) Ketegangan dunia menjadi agak berkurang;
   2) Politik rasialis (diskriminasi warna kulit) mulai berkurang;
   3) Negara-negara penjajah mulai melepaskan daerah jajahannya.

   Konferensi Asia Afrika berhasil menggalang solidaritas di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika. Dasa sila Bandung telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang Asia-Afrika yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya. Sebelum diselenggarakan KAA, hanya ada lima negara Afrika yang merdeka, yaitu Ethiopia, Mesir, Libya, Liberia, dan Afrika Selatan. Sejak KAA sampai tahun 1965, tercatat sebanyak 33 negara Afrika memperoleh kemerdekaannya.



Gambar 4.7 Tokoh Penggagas Gerakan Non Blok Soekarno, Yosep Broz Tito, Gamal abdul Nasser, Jawaharlal Nehru, Nkrumah

5. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok

Pasca Perang Dunia II muncul dua blok raksasa dunia, yaitu Blok Barat dan Blok timur. Blok Barat yang berhaluan liberalis dan kapitalis dipimpin Amerika serikat, dengan angotanya Inggris, Perancis, Belanda, Italia, Jerman Barat, Kanada, Belgia, Australia, Norwegia, Turki, Yunani, dan Portugal. Blok Timur yang berhaluan komunis dipimpin Uni Soviet dengan anggota, seperti Polandia, Jerman Timur, Hongaria,Bulgria, Rumania, Cekoslowakia, dan Albania.

Blok Barat dan Blok timur selalu terlibat dalam ketegangan yang berlanjut pada "perang dingin". Ketegangan tersebut disebabkan adanya perbedaan ideologi, saling berlomba senjata nuklir, pembentukan pakta militer yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Untuk meredakan ketegangan di antara dua blok, negara-negara yang cinta damai mengupayakan berbagai pertemuan dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik guna mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Gerakan Non Blok merupakan wadah negara-negara yang tidak menjadi anggota Blok Barat maupun Blok Timur. Gerakan Non Blok ikut aktif berperan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa Internasional. Negara-negara Non Blok tidak ingin dijadikan objek kepentingan dua raksasa dunia dalam pergolakan politik internasional. Negara-negara Non Blok tidak mau diombang-ambingkan dua ideologi raksasa yang sedang berlomba berebut pengaruh.

Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya Non Blok adalah:

1. Presiden Soekarno (Indonesia);
2. Presiden Yosep Broz Tito (Yugoslavia);
3. Presiden Gamal abdul Nasser (Mesir);
4. Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India);
5. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).

6. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia

Pada tahun 1963-1964 terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, yang bermula dari pembentukan Federasi Malaysia. Gagasan pembentukan Federasi Malaysia pertama kali dilontarkan Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rachman pada 27 Mei 1961. Menurutnya, federasi yang akan dibentuk terdiri dari Malaysia, Singapura, Serawak, dan Sabah. Pembentukan Federasi Malaysia ini dianggap Indonesia seabagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Akibatnya, pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia terputus.

7. Indonesia Keluar dari PBB

Ketika konfrontasi Indonesia dan Malaysia berlangsung, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia jelas tidak menyetujui pencalonan itu. Selanjutnya, Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akhirnya, sebagai protes sejak 7 Januari 1965 presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB merupakan puncak keterkucilan Indonesia dari pergaulan Internasional.



www.presiden.ri.id

Gambar 4.8 Suasana Sidang di PBB

8. Indonesia Kembali menjadi Anggota PBB

Sejak keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil dari pergaulan Internasional. Kenyamanan dan kebersamaan hidup dengan bangsa lain tidak dapat dirasakan lagi. Begitu pula pembangunan negara menjadi terhambat sehingga berakibat pada kesengsaraan rakyat. Menyadari adanya kerugian itu, maka Indonesia memutuskan untuk masuk kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966 kembali masuk menjadi anggota PBB juga sebagai anggota yang ke-60. Tindakan Indonesia ini mendapat dukungan dari Aljazair, Filipina, Jepang, Mesir, Pakistan, dan Thailand.



www.presiden.ri.go.id

Gambar 4.9 Penandatanganan Pemulihan Hubungan RI dan Malaysia

9. Menghentikan Konfrontasi dengan Malaysia

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dianggap tidak sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tindakan ini amat merugikan kedua belah pihak. Hubungan sebagai negara tetangga terputus. Tindakan saling bermusuhan ini harus segera diakhiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berniat melakukan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia.

Upaya merintis normalisasi hubungan dimulai dengan diselenggarakannya perundingan di Bangkok 29 Mei -1 Juni 1966. Indonesia di wakili Menlu Adam Malik dan Malaysia diwakili Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Sebagai tindak lanjut pertemuan Bangkok, pada tanggal 11 Agustus 1966 diadakan pertemuan Jakarta. Kedua delegasi menyepakati normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia. Tokoh yang menandatangani persetujuan itu adalah Adam Malik dan Tun Abdul Razak. Terselenggaranya pertemuan tersebut menandai berakhirnya permusuhan di antara Indonesia dan Malaysia.



Gambar 4.10 Pertemuan untuk Mendirikan ASEAN

10. Pembentukan ASEAN

Pada tanggal 8 Agustus 1967 lima negarawan Asia Tenggara menandatangani sebuah deklarasi pembentukan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau yang lebh dikenal dengan *Association of South East Asian Nations (ASEAN*). Organisasi regional ini dibentuk dengan bertitik tolak dari kesadaran bangsa-bangsa Asia Tenggara akan perlunya solidaritas dan kerja sama di antara mereka. Melalui kebersamaan sikap dan tindakan itu, diharapkan akan tercipta suatu perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN didukung adanya kesamaan dalam beberapa hal, yaitu :

a. persamaan letak geografis;
b. persamaan budaya, yakni Melayu Austronesia;
c. persamaan sejarah dan nasib, sama-sama bekas dijajah;
d. persamaan kepentingan di bidang ekonomi,sosial, dan budaya.

Adapun tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 itu adalah:

a. Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik);
b. Wakil Perdana Menteri Malaysia (Tun Abdul Razak);
c. Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos);
d. Menteri Luar Negeri Singapura (Sinatambi Rajaratnam);
e. Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman).

Jago Berlatih

Isilah tabel tentang peran Indonesia dalam kerja sama internasional di bawah ini!

No	Momentum Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama ASEAN	Tahun
1		
2		
3		
4		
5		

C. Kerja sama Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia

1. Kerja sama Internasional Bidang Kesehatan

Memerangi HIV/AIDS lewat program bersama PBB mengenai HIV/AIDS (UNAIDS). Tujuannya adalah untuk mencegah penularan, memberikan perawatan dan bantuan, menurunkan kerentanan individu dan masyarakat, serta mengurangi dampak dari epidemik HIV/AIDS. Bidang prioritasnya adalah pemuda, penduduk yang sangat rentan, pencegahan penularan dari ibu ke anak, perawatan AIDS, pengembangan vaksin.

2. Kerja sama Internasional Pengurangan Kemiskinan

Kegiatan ini lewat proklamasi Majelis Umum PBB bahwa tahun 1997 – 2006 sebagai Dasawarsa Internasional untuk penghapusan kemiskinan.



www.googleimage.co.id

Gambar 4.11 *KTT APEC di Bogor*

3. Kerja sama Internasional Bantuan untuk Anak-anak

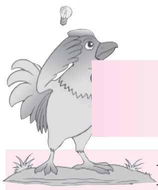
Di bentuknya dana anak-anak PBB (UNICEF) pada tahun 1946 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada hak-hak anak. Usaha yang dilakukan dengan memberikan kepada mereka perawatan kesehatan, gizi, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

4. Kerja sama Internasional di Bidang Obat Terlarang

Disetujuinya konvensi PBB menentang perdagangan gelap narkotika , dan bahan-bahan psikotropika (1988).

5. Kerja sama Internasional Perlindungan Lingkungan Laut

Disetujuinya Konvensi mengenai pencegahan polusi laut karena pembuangan limbah dan bahan-bahan lainnya.



Jago Berpikir

Rangkailah dalam sebuah kata baik secara horisontal maupun vertikal! Temukan nama 10 negara di dalamnya!

A	B	P	R	U	S	I	A	B
N	M	R	U	T	D	N	N	A
G	M	E	S	I	R	D	D	B
O	A	M	R	F	R	I	O	P
L	Y	Y	P	I	I	A	R	R
A	A	A	U	P	K	P	A	A
W	S	M	A	L	T	A	N	N
B	O	S	N	I	A	H	G	G
M	A	L	A	D	E	W	A	I
U	L	I	B	A	N	O	N	S

6. Kerja sama Internasional Hak-hak Asasi Manusia

a. Disetujuinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
b. Disetujuinya Deklarasi Hak Asasi Anak (1959).
c. Disetujuinya Perjanjian Internasional mengenai hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan (1966).
d. Disetujuinya Perjanjian International tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966).
e. Disetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (1979).
f. Disetujuinya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum yang tidak Manusiawi atau Merendahkan Derajat (1984).

7. Kerja sama Internasional Bidang Perdamaian dan Keamanan Internasional

a. Membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda lewat pembentukan Komisi Tiga Negara maupun Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI).
b. Dibentuk Organisasi Pengawasan Perdamaian PBB 1948 di Timur Tengah.
c. Dibentuk Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan Pakistan (UNMOGIP) 1949.
d. Dibentuk Misi Perserikatan Transisional PBB di Timor-Timur (UNTAET)



www.sejarah.tni.id

Gambar 4.12 Pengiriman Pasukan Garuda untuk Misi Perdamaian Dunia



Jago Berlatih

Cobalah berlatih mengisi titik-titik di bawah ini! Kerjakan di buku tugasmu.

1. Konvensi PBB menentang perdagangan gelap narkotika , dan bahan-bahan psikotropika disahkan pada tahun ....
2. .... adalah misi PBB di Timor Timur (sekarang Timor Leste)
3. ... dan ... dibentuk untuk membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda
4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disetujui pada tahun ....

Rangkuman

1. Kerja sama yang hanya melibatkan dua negara disebut kerja sama bilateral, sedangkan yang melibatkan lebih dari dua negara disebut multilateral.
2. Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia bebas dari ikatan-ikatan apapun dari kekuatan dunia yang saling bertentangan. Aktif artinya Indonesia senantiasa berusaha dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih banyak mengarah kepada politik konfrontasi dan meninggalkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
4. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 28 September 1950;
5. Indonesia menjadi salah satu sponsor dan sekaligus sebagai tuan rumah di selenggarakannya Konferensi Asia-Afrika tahun 1955;
6. Indonesia menjadi salah satu pencetus gagasan didirikan Gerakan Non Blok pada tahun 1961;
7. Indonesia menjadi salah satu pendiri organisasi kerja sama regional Asia Tenggara "ASEAN" yang dideklarasikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967;
8. Indonesia bersama-sama dengan anggota ASEAN lainnya menyetujui dijadikannya ASEAN sebagai "Kawasan yang Damai, Bebas dan Netral" lewat Deklarasi ZOPFAN yang ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971;
9. Indonesia menjadi salah satu anggota Pasar Bebas di Kawasan Asia Pafisik (APEC);
10. Indonesia pernah menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan konflik di Kamboja, lewat pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting (JIM).
11. Sumbangan RI dalam mewujudkan perdamaian dunia contohnya adalah dengan mengirimkan Kontingen Garuda sampai empat belas kali;
12. Walaupun RI bukan Negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, maka Indonesia menjadi anggota OKI dan banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan umat Islam.



Uji Kompetensi

Ayo mengukur kemampuanmu dalam memahami materi yang telah kamu pelajari. Kemampuanmu dapat kamu ukur dengan mengerjaan soal-soal berikut. Selanjutnya, mintalah saran kepada gurumu apakah kemampuanmu sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan.

A. *Memilih jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat*

1. Hubungan luar negeri yang melibatkan dua negara disebut....
   a. bilateral
   b. multilateral
   c. polilateral
   d. diplomasi
2. Secara resmi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dinyatakan pada....
   a. 17 Agustus 1945
   b. 2 September 1948
   c. 27 Juli 1950
   d. 8 Agustus 1967
3. Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, bebas artinya....
   a. dapat berhubungan dengan negara mana pun
   b. dapat berpihak pada blok Barat maupun blok Timur
   c. tidak terikat negara mana pun
   d. tidak berurusan dengan negara mana pun
4. Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, aktif artinya....
   a. giat menjalin persahabatan dengan negara mana pun
   b. giat menata negara lain
   c. aktif mmenghapuskan penjajahan di dunia
   d. aktif mengenalkan politik luar negeri Indonesia
5. Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan....
   a. kemerdekaan
   b. perdamaian
   c. keadilan sosial
   d. kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
6. Latar belakang lahirnya gerakan Non-Blok adalah....
   a. adanya perang dingin antara blok Utara dan Selatan
   b. adanya perang dingin antara blok Barat dan Timur
   c. adanya Perang Dunia I
   d. adanya Perang Dunia II

7. Tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik di luar negeri adalah….
   a. duta besar
   b. konsul jenderal
   c. menteri luar negeri
   d. diplomat
8. Dalam menyelesaikan konflik Indonesia lebih memilih menggunakan cara….
   a. diplomasi
   b. kekerasan
   c. kekeluargaan
   d. konfrontasi
9. Politik luar negeri, bebas aktif memiliki landasan idiil….
   a. Pancasila
   b. UUD 1945
   c. Tap MPR
   d. UU
10. Usaha Pemerintah RI untuk mengurangi ketegangan antara blok Barat dan Timur, pada tahun 1955 mengadakan konferensi di Bandung yang terkenal dengan ….
   a. Konferensi Tingkat Tinggi
   b. Konferensi Asia Afrika
   c. Konferensi Malino
   d. Konferensi Meja Bundar

B. Mengisi titik-titik dengan jawaban yang benar. Kerjakan di buku tugas.

1. Kerjasama dua negara disebut….
2. Kersasama lebih dari dua negara (banyak negara) disebut….
3. Jika terjadi sengketa antar negara, pemerintah Indonesia menginginkan penyelesaian melalui….
4. Dalam mengadakan hubungan dan kerja sama antar negara sebaiknya saling….
5. Perwakilan Indonesia di luar negeri yang m,engurusi perdagangan disebut….
6. Indonesia masuk menjadi anggota PBB pertama kali tahun….
7. Landasan idiil politik luar negeri RI adalah….
8. Politik luar negeri RI bebas aktif, bebas artinya….
9. Aktif artinya…
10. Pasukan perdamaian yang bertugas menyelesaikan sengketa antarnegara dari Indonesia disebut….

C. Menjawab pertanyaan

1. Mengapa setiap negara perlu menjalin hubungan Internasional?
2. Apa tujuan dilakukannya kerjasama Internasional?
3. Apa yang kamu ketahui tentang AFTA?
4. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri itu?
5. Sebutkan landasan politik luar negeri Indonesia!
6. Jelaskan asas politik luar negeri Indonesia!
7. Uraikan ciri-ciri politik bebas aktif!
8. Terangkan tujuan politik luar negeri Indonesia!
9. Jelaskan perkembangan politik luar negeri Indonesia!
10. Tunjukkan wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif!

Aktivitasmu



Kerjakan secara mandiri

Terorisme merupakan persoalan internasional yang harus diatasi melalui kerja sama antar negara. Indonesia juga seharusnya beperan dalam kerja sama internasional untuk memberantas dan mencegah terorisme.

Bacalah berita-berita di koran atau buku-buku mengenai peran Indonesia dalam pemberantasan terorisme. Tanyakan kepada orang tua atau orang yang menurut kamu tahu mengenai masalah terorisme.

Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut, kemudian kumpulkan kepada gurumu!

1. Apa yang kamu ketahui tentang terorisme?
2. Siapa saja pelaku terorisme yang kamu ketahui?
3. Apa peran Indonesia dalam memberantas terorisme?

Selamat beraktivitas!



Latihan Ulangan Umum Semester 2

Ayo mengukur kemampuan selama satu semester dengan mengerjakan perintah-perintah di bawah ini. Setelah itu gurumu akan memberikan evaluasi apakah kemampuanmu sudah mencapai target yang diinginkan atau masih perlu ditingkatkan.

A. Memilih a, b, c, atau d sebagai jawaban yang tepat!

1. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut, *kecuali*....
   a. perdamaian di kawasan Asia Tenggara
   b. pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara
   c. kerja sama bidang militer
   d. memelihara kerjasama di kawasan Asia Tenggara
2. Negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas dan penduduk paling banyak adalah.....
   a. Malaysia
   b. Indonesia
   c. Filipina
   d. Thailand
3. Secara geografis wilayah Asia Tenggara sebelah timur berbatasan dengan....
   a. samudera Hindia
   b. samudera Pasifik
   c. Papua Nugini
   d. Cina
4. Kerjasama ASEAN dimulai ketika terjadi deklarasi....
   a. Bangkok
   b. Singapura
   c. Kualalumpur
   d. Jakarta
5. Negara Jiran (negara tetangga) Indonesia yang paling dekat adalah....
   a. Filipina
   b. Thailand
   c. Malaysia
   d. Myanmar

6. Asia Tenggara amat strategis, karena....
   a. terletak di kawasan Asia Pasifik
   b. memiliki perairan yang luas
   c. kekayaan alamnya sangat melimpah
   d. terletak pada jalur lalu lintas dunia yang ramai
7. Pada awal berdirinya anggota ASEAN berjumlah....
   a. 5 negara
   b. 6 negara
   c. 7 negara
   d. 8 negara
8. Sekretariat ASEAN terdapat di negara....
   a. Malaysia
   b. Indonesia
   c. Filipina
   d. Singapura
9. Penyelesaian konflik antarnegara ASEAN sebaiknya dilakukan dengan cara......
   a. damai
   b. kekerasan
   c. hukuman
   d. pemboikotan
10. Gagasan tentang AFTA mulai diluncurkan pada KTT ASEAN IV di negara....
    a. Thailand
    b. Singapura
    c. Malaysia
    d. Fulipina
11. Lingkaran yang ada pada loga ASEAN melambangkan....
    a. cita-cita pendiri
    b. keberanian dan kedinamisan
    c. kemakmuran
    d. persatuan
12. Tokoh deklarator ASEAN yang berasal dari Thailand adalah....
    a. Narcisco Ramos
    b. Rajaratnam
    c. Thanant Khoman
    d. Tun Abdul Razak
13. Salah satu asas ASEAN adalah....
    a. membantu pertumbuhan ekonomi nasional negara anggota
    b. membentuk kelompok kerja ekonomi di kawasan Asia
    c. ikut campur tangan terhadap persoalan dalam negeri negara anggota
    d. membantu negara-negara lain untuk menjajah negara yang lemah

14. Negara di Asia yang masuk menjadi anggota ASEAN ke-10 adalah....
    a. Vietnam
    b. Laos
    c. Myanmar
    d. Kamboja
15. Presiden RI yang menolak untuk bergabung dengan SEATO adalah....
    a. Ir Soekarno
    b. Soeharto
    c. B.J. Habibie
    d. Abdurrahman Wahid
16. Hubungan luar negeri yang melibatkan dua negara disebut....
    a. bilateral
    b. multilateral
    c. polilateral
    d. diplomasi
17. Secara resmi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dinyatakan pada....
    a. 17 Agustus 1945
    b. 2 September 1948
    c. 27 Juli 1950
    d. 8 Agustus 1967
18. Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, bebas artinya....
    a. dapat berhubungan dengan negara mana pun
    b. dapat berpihak pada blok Barat maupun blok Timur
    c. tidak terikat negara mana pun
    d. tidak berurusan dengan negara mana pun
19. Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, aktif artinya....
    a. giat menjalin persahabatan dengan negara mana pun
    b. giat menata negara lain
    c. aktif mmenghapuskan penjajahan di dunia
    d. aktif mengenalkan politik luar negeri Indonesia
20. Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan....
    a. kemerdekaan
    b. perdamaian
    c. keadilan sosial
    d. kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
21. Latar belakang lahirnya gerakan Non-Blok adalah......
    a. adanya perang dingin antara blok Utara dan Selatan
    b. adanya perang dingin antara blok Barat dan Timur
    c. adanya Perang Dunia I
    d. adanya Perang Dunia II

22. Tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik di luar negeri adalah….
   a. duta besar
   b. konsul jenderal
   c. menteri luar negeri
   d. diplomat
23. Dalam menyelesaikan konflik Indonesia lebih memilih menggunakan cara….
   a. diplomasi
   b. kekerasan
   c. kekeluargaan
   d. konfrontasi
24. Politik luar negeri, bebas aktif memiliki landasan idiil….
   a. Pancasila
   b. UUD 1945
   c. Tap MPR
   d. UU
25. Usaha Pemerintah RI untuk mengurangi ketegangan antara blok Barat dan Timur, pada tahun 1955 mengadakan konferensi di Bandung yang terkenal dengan ….
   a. Konferensi Tingkat Tinggi
   b. Konferensi Asia Afrika
   c. Konferensi Malino
   d. Konferensi Meja Bundar

B. Menjawab pertanyaan!

1. Sebutkan negarawan yang menandatangani berdirinya ASEAN!
2. Mengapa letak Asia Tenggara strategis?
3. Jelaskan asas ASEAN!
4. Apa tujuan ASEAN?
5. Berilah tiga contoh peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara!
6. Mengapa setiap negara perlu menjalin hubungan internasional?
7. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri itu?
8. Apa tujuan dilakukannya kerjasama internasional?
9. Apa yang kamu ketahui tentang AFTA?
10. Sebutkan landasan politik luar negeri Indonesia!
11. Jelaskan asas politik luar negeri Indonesia!
12. Uraikan ciri-ciri politik bebas aktif!
13. Tunjukkan wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif!
14. Terangkan tujuan politik luar negeri Indonesia!
15. Jelaskan perkembangan politik luar negeri Indonesia!

Daftar Pustaka

Astrid S. Susanto. 1995. *Globalisasi dan Komunikasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bonnie Setiawan. 2001. *Menggugat Globalisasi*. Jakarta: INFID (*International NGO Forum on Indonesia Development)* dan dan IGJ (*Intstitut for Global Justice).*

BSNP. 2006. *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD.* Jakarta: Diknas.

Departemen Dalam Negeri. 2006. *Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.*

Edi Sigar. 2003. *Buku Pintar Indonesia*. Jakarta: Pustaka Delapratasa.

Fokus Media. 2005. *Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.*

Inu Kencana Syafiie. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mas'ud Thayib. 1995. *Atlas Indonesia, Dunia dan Budayanya.* Jakarta: CV Tarity Samudera Berlian.

Sunarso. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sunarso. 2005. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: PPKP Press.

Semiawan, Conny R. 1996. *Ensiklopedi Populer Anak Jilid 1-6.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Sekretariat Negara. 2004. *50 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Sekneg.

Sekretariat Negara. 2005. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekneg.

Staf Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia.* Jakarta: Djambatan.

Naisbitt, John dan Patricia Aburdene. 1990. *Megatrends 2000*: Ten New Directions for the 1990's. New York: Avon Books.

Qodri Azizy. 2003. *Melawan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Glosarium

abolisi	:	penghapusan (pencabutan) hukuman
agresi	:	serangan
amnesti	:	pengampunan oleh kepala negara
angket	:	hak untuk
bilateral	:	Hubungan antara dua pihak (negara)
budget	:	anggaran
deklarasi	:	pengumuman, pemberitahuan
Delegasi	:	utusan
diplomasi	:	tugas yang dijalankan oleh diplomat, utusan negara, dan sebagainya dalam hubungan antar negara; kemampuan untuk berargumen secara baik
diskriminatif	:	bersifat memberikan perlakuan yang tidak sama
era	:	jaman
grasi	:	pengampunan
ideologi	:	seperangkat gagasan dasaryang dianut atau dipedomani
idiil	:	mendasar, luhur
imunitas	:	kekebalan hukum
independen	:	bebas, merdeka
Inspektoral	:	pengawasan
Investasi	:	penanaman Modal
integritas	:	kepribadian
interpelasi	:	hak untuk bertanya
intervensi	:	campur tangan
kampanye	:	gerakan atau kegiatan untuk menarik simpatisan
kapitalis	:	pemilik modal
kolonialisme	:	penjajahan
komisi	:	panitia, badan, lembaga
komite	:	panitia
Kompetisi	:	perlombaan
Komponen	:	bagian, unsur
Komunitas	:	masyarakat
konferensi	:	perundingan akbar, muktamar

konfrontasi	:	pertentangan, saling berlawanan dengan berhadap-hadapan
konstitusi	:	undang-undang dasar; hukum dasar
korupsi	:	perilaku menggelapkan/merugikan keuangan negara
kristalisasi	:	penjernihan
liberalis	:	penganut liberalisme (paham kebebasan)
momentum	:	waktu, even, saat
monarki	:	kerajaan
multilateral	:	hubungan antar beberapa negara
otonomi	:	kemandiri
pakta	:	persekutuan kerjasama, persetujuan
paripurna	:	sempurna; tuntas
proklamasi	:	pengumuman, pemberitahuan kepada khalayak
pleno	:	rapat lengkap
rasialisme	:	paham yang membeda-bedakan ras
reformasi	:	perubahan atau perpindahan ke tatanan baru
regional	:	daerah
rehabilitasi	:	pemulihan, perbaikan
rekomendasi	:	saran, nasehat, rujukan
solidaritas	:	rasa setia kawan
solusi	:	jalan keluar
stabilitas	:	kemantapan, keseimbangan
solusi	:	jalan keluar
toleransi	:	sikap menghargai pendapat orang lain yang berbeda
terorisme	:	gerakan mengacau tatanan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu (biasanya bersifat politis)
territorial	:	wilayah; bersifat kewilayahan

Indeks



Wahana Belajar

Pendidikan Kewarganegaraan 6

Dalam buku ini kamu akan mempelajari materi tentang pelajaran **Pendidikan Kewarganegaraan**. Materi disampaikan melalui cara yang menyenangkan sehingga kamu akan mudah memahaminya. Selain itu, kasus-kasus yang dibahas adalah yang ada di sekelilingmu. Kamu dapat memahami dan menerapkan apa yang diajarkan di buku ini dalam kehidupan sehari-hari.

Selain materi pelajaran, dalam buku ini kamu juga akan menemukan aktivitas-aktivitas yang dapat kamu lakukan. Aktivitas-aktivitas ini dikemas dalam kolom **Jago berlatih, Jago Berpikir**, serta Aktivitasmu. Ada pula kegiatan bermain dan bernyanyi. Semua ini dihadirkan agar kamu dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang membuatmu lebih memahami dan mampu menerapkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Ikon atau lambang jago yang dihadirkan memang sengaja diciptakan untuk membuatmu lebih bersemangat dan lebih 'jago.'

Semua keterangan tentang buku ini dapat kamu pahami dengan mudah dalam Petunjuk Penggunan Buku di halaman depan buku ini.

ISBN 978-979-068-625-0 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-644-1

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 9.116,-